

Pendalaman Demokrasi:

- Strategi untuk**
- Meningkatkan**
- Integritas**
- Pemilihan Umum**
- di Seluruh Dunia**

LAPORAN DARI KOMISI
GLOBAL UNTUK PEMILIHAN UMUM,
DEMOKRASI DAN KEAMANAN

September 2012

Daftar Isi

Anggota Komisi	2
Pendahuluan oleh Bpk. Kofi A. Annan, Ketua Komisi Global	3
Rangkuman Eksekutif dan Rekomendasi	5
<hr/>	
Bab 1: Mengapa Pemilu Berintegritas Penting	12
Bab 2: Tantangan Utama Pemilu Berintegritas	20
Bab 3: Aksi Nasional untuk Pemilu Berintegritas	42
Bab 4: Aksi Internasional untuk Pemilu Berintegritas	52
Bab 5: Rekomendasi	66
<hr/>	
Catatan Akhir	71
Singkatan	74
Ucapan Terima Kasih	75

Anggota Komisi



Bpk. Kofi A. Annan

Ketua

Mantan Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Yayasan Kofi Annan



Y.M. Dr Ernesto Zedillo Ponce de León

Wakil Ketua

Mantan Presiden Meksiko, Frederick Iseman Direktur '74, Pusat Studi Globalisasi Yale



Y.M. Bpk. Martti Ahtisaari

Mantan Presiden Republik Finlandia



Dr Madeleine K. Albright

Mantan Menteri Luar Negeri AS dan Pimpinan National Democratic Institute (NDI)

Potret oleh Timothy Greenfield-Sanders



Ibu Louise Arbour

Presiden dan Direktur Eksekutif Kelompok Krisis Internasional (ICG)



Bpk. Vidar Helgesen

Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Pendampingan Pemilu (International IDEA)



Dr Rima Khalaf Hunaidi

Pejabat Senior dan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Barat (UN ESCWA)



Y.M. Dr Festus Mogae

Mantan Presiden Botswana



Professor Amartya Sen

Profesor Ekonomi, Universitas Harvard



Dr Javier Solana

Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa



Y.M. Prof Dr Vaira Vīķe-Freiberga

Mantan Presiden Republik Latvia



Y.M. Dr N. Hassan Wirajuda

Mantan Menteri Luar Negeri, dan Anggota Dewan Penasihat Presiden Republik Indonesia

Friends of the Global Commission



Ibu Helen Clark

Administrator Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa



Bpk. B. Lynn Pascoe

Mantan Pejabat Senior untuk Urusan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pendahuluan oleh Bpk. Kofi A. Annan

Penyebaran demokrasi di seluruh dunia merupakan satu dari sekian banyak perubahan paling dramatis yang telah saya saksikan sepanjang karir saya. Dari satu negara ke negara lain, rakyat telah meresikokan hidup mereka demi pemilihan umum (pemilu) yang bebas, pertanggungjawaban demokrasi, peraturan hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Pemilu merupakan akar yang sangat diperlukan bagi demokrasi. Sesuatu yang kini hampir universal. Sejak 2000, semua kecuali 11 negara telah menyelenggarakan pemilu nasional. Namun agar kredibel, kami perlu melihat standar yang tinggi pada saat sebelum, selama dan sesudah suara diberikan. Organisasi oposisi harus bebas menyelenggarakan dan berkampanye tanpa rasa takut. Harus ada tataran yang setara di antara para kandidat. Pada saat pemilihan, para pemilih harus merasa aman dan mempercayai kerahasiaan dan integritas surat suara. Dan ketika suara telah dihitung, hasilnya harus diterima betapa pun kecewanya kandidat yang telah dikalahkan.

Ketika pemilih yakin bahwa pemilu telah bebas dan adil, mereka dapat menjadi katalis yang manjur untuk pemerintahan yang lebih baik, keamanan dan pembangunan manusia yang lebih besar. Tetapi dengan ketiadaan pemilu yang kredibel, penduduk tidak memiliki jalan lain menuju perubahan politik yang damai. Risiko konflik meningkat sementara korupsi, intimidasi, dan penipuan tidak dapat

dikendalikan, memperburuk keseluruhan sistem politik secara perlahan dari dalam.

Saya mengalaminya dari dekat saat pemilu presiden yang cacat di Kenya tahun 2007 mengarah pada kekerasan yang tak dapat dikendalikan, pembunuhan dan perpindahan penduduk. Saya juga telah melihat, betapa besar perkembangan Afrika pada dekade terakhir, risiko yang diputarbalikkan oleh pendekatan “pemenang memperoleh segalanya” “winner-take-all” terhadap pemilu dan kekuasaan, yang telah merusak benua sedemikian hebatnya.

Sehingga, sementara pemilu tidak pernah seuniversal dan sepenting ini, manfaat pemilu sama sekali tidak terjamin. Baru-baru ini, pemilu telah digunakan oleh pemerintah autokrasi untuk menyembunyikan mereka dalam kedok legitimasi demokrasi.

Demokrasi baru berjuang untuk mengkonsolidasikan manfaat demokrasi, sementara pertumbuhan ketidakmerataan memberikan tekanan pada banyak demokrasi yang lebih lama demi menunjukkan bahwa mereka relevan pada kepedulian dan kesejahteraan penduduk. Di seluruh dunia, keuangan politik yang tak dapat dikendalikan mengancam runtuhnya demokrasi dan terenggutnya kekuatan unik demokrasi. Demi menyampaikan kepedulian ini dan menunjukkan solusi maka saya mengundang sekelompok mantan pemimpin yang terhormat dan pakar yang terkenal untuk mempertimbangkan cara mempromosikan dan melindungi integritas pemilu. Komisi

Global dibentuk sebagai gagasan gabungan Yayasan Kofi Annan dan Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Pendampingan Pemilu (International IDEA). Komisi ini memiliki tanggung jawab penuh dan independen terhadap laporannya, dan para anggota Komisi bertugas menurut kapasitas individu masing-masing.

Sungguh kenikmatan luar biasa dan pengalaman yang memperkaya saya untuk bekerja dengan Komisi yang terdiri dari sekelompok penduduk global yang berpengalaman, sangat berkomitmen dan energetik. Saya berterima kasih pada mereka atas dedikasi, kontribusi dan kerja sama mereka. Saya juga ingin memberikan penghormatan pada Ernesto Zedillo, Wakil Ketua, dan Stephen Stedman, Direktur Komisi, atas kepemimpinan intelektual dan keterlibatan aktif mereka pada proyek besar ini. Kami dilayani dengan sangat baik oleh sekretariat yang sungguh andal di International IDEA dan tim riset di Universitas Stanford. Pada akhirnya, saya juga ingin menyatakan penghargaan saya pada Vidar Helgesen, Sekretaris Jenderal International IDEA dan para anggotanya atas dukungan kuat mereka, dan juga pada Ruth McCoy serta Michael Møller, Direktur Yayasan Kofi Annan, atas keahlian mereka mengelola gagasan ini.

Untuk pemerintah, pejabat terpilih dan penduduk seluruh dunia, Komisi

ini menyajikan strategi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa politisi dan pemerintahan petahana akan mendalami demokrasi dan meningkatkan integritas pemilu nasional. Dalam melakukannya, kami berharap bahwa Laporan kami akan membantu memperluas pemahaman mengenai persyaratan bagi masyarakat yang kuat, demokratis dan kohesif.

Dari pengalaman saya, saya belajar bahwa masyarakat yang sehat dibangun dengan tiga pilar: damai dan aman; pembangunan ekonomi; dan peraturan hukum dan menghargai hak asasi manusia. Telah sekian lama, kita telah memberikan prioritas pada dua pilar pertama dan mengabaikan yang ketiga. Saat melihat tantangan ke depan yang berhadapan dengan masyarakat internasional, saya percaya bahwa kini tiba waktunya untuk menggarisbawahi ketaatan hukum, pemerintahan yang demokratis dan pemberdayaan penduduk sebagai unsur integral untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, keamanan dan kedamaian yang bertahan lama.



Kofi A. Annan
Ketua, Komisi Global untuk Pemilihan Umum, Demokrasi dan Keamanan

Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi

Sejak tahun 2000, semua kecuali 11 negara telah menyelenggarakan pemilu nasional. Pemilu dapat memperpanjang demokrasi, pembangunan, hak asasi manusia dan keamanan, atau merusaknya, dan untuk alasan ini sendiri, mereka harus diberi perhatian dan prioritas. Lebih dari 50 negara telah menganut demokrasi dalam waktu 20 tahun terakhir dan kini berjuang untuk mengkonsolidasi pemerintahan yang demokratis. Resesi global dan ketidaksamaan bangkitnya ekonomi memberikan tekanan pada banyak demokrasi, termasuk demokrasi lama, demi menunjukkan bahwa mereka relevan bagi kepedulian dan kesejahteraan penduduk. Di jazirah Arab, ketika aspirasi demokrasi telah lama hilang, penduduk kini memiliki peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyadari aspirasi-aspirasi tersebut, tetapi juga menghadapi perangkat berbahaya. Kebangkitan keuangan politik yang tak dapat dikendalikan mengancam runtuhnya demokrasi di mana saja di dunia, dan juga merampas demokrasi dari kekuatan uniknya—kesetaraan politik, pemberdayaan mengenai pencabutan hak pilih warga negara dan kemampuan untuk mengelola konflik masyarakat secara damai.

Agar pemilu dapat mewujudkan demokrasi, pengembangan lebih lanjut dan menggalakkan keamanan, pemilu harus diselenggarakan dengan integritas. Ketika pemilu memiliki integritas, prinsip dasar demokrasi

yaitu kesetaraan politik dihormati; warga memilih pemimpin mereka, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Ketika pemilu tak ada integritas, politisi, pejabat dan lembaga tidak bertanggung jawab pada publik, yaitu menolak peluang yang setara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses politik. Kepercayaan publik pada pemilu akan melemah dan pemerintahan akan kurang legitimasinya. Pada kasus-kasus seperti ini, lembaga demokrasi merupakan tempurung kosong, kehilangan etos dan semangat demokrasi.

‘Pemilu berintegritas penting bagi nilai-nilai yang kami junjung tinggi—hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Pemilu memberi kehidupan bagi hak yang diabadikan dalam Deklarasi Universal atas Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan suatu negara melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, hak untuk akses yang sama pada layanan publik di suatu negara, dan pengakuan bahwa kewenangan pemerintah berasal dari keinginan rakyat, dinyatakan dalam ‘pemilu yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia.’

Tetapi di samping untuk mengangkat nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia, pemilu berintegritas dapat juga memberi manfaat nyata pada para penduduknya. Bukti dari seluruh dunia memberitakan bahwa pemilu berintegritas penting untuk memberdayakan perempuan, memerangi korupsi, memberikan pelayanan bagi rakyat miskin, meningkatkan pemerintahan dan mengakhiri perang saudara. Untuk lebih jelasnya, pemilu berintegritas tidak dapat membangun ekonominya sendiri, menciptakan pemerintahan yang baik atau membuat suasana damai, tetapi riset baru-baru ini menyarankan bahwa pemilu yang ditingkatkan dapat menjadi langkah yang katalitik menuju perwujudan potensi transformatif demokrasi.

Ketika dilaksanakan dengan integritas, proses pemilu berada pada jantung kemampuan demokrasi untuk memberikan penyelesaian terhadap konflik secara damai. Kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan memerlukan debat, informasi, interaksi antar warga dan partisipasi yang berarti dalam pemerintahan mereka sendiri, semuanya yang berpotensi untuk mengubah pikiran warga negara dan mengizinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang otoriter. Pemilu berintegritas dapat memperdalam demokrasi dan meningkatkan pertimbangan publik serta penalaran tentang isu-isu yang menonjol dan cara untuk menyikapinya.

Definisi: Pemilu berintegritas

Kami mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu.

Tantangan Utama Pemilu Berintegritas

Lima tantangan utama yang harus ditangani untuk menyelenggarakan pemilu berintegritas:

- membangun peraturan hukum untuk membenarkan klaim terhadap hak asasi manusia dan keadilan pemilu;
- membangun badan penyelenggaraan pemilu (EMB) yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan mendapatkan kepercayaan publik yang layak;
- menciptakan institusi dan norma persaingan multi-partai serta pembagian kekuasaan yang menunjang demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara para pesaing politik;
- menghilangkan hambatan—hukum, administratif, politik, ekonomi dan sosial—terhadap partisipasi politik yang setara dan universal; dan
- mengatur keuangan politik yang tak dapat dikendalikan, tertutup dan samar.

Dimulai dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, terdapat prinsip, standar, hak dan peraturan yang sudah didefinisikan dengan baik yang dilakukan pemerintah untuk mewakili diselenggarakannya pemilu berintegritas. Prinsip-prinsip tersebut fundamental, namun jika tidak ada yang dirujuk dengan bebas sebagai ketaatan hukum—kapasitas dan norma yang menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab secara hukum, bahwa warga negara setara di mata hukum, bahwa legislator dan penegakannya tidak sewenang-wenang, dan bahwa hukum menghargai hak asasi manusia—maka standar, prinsip, kerangka hukum dan hak itu sendiri, tidak dapat diwujudkan.

Kedua, untuk pemilu berintegritas, maka harus dilaksanakan secara kompeten dengan profesional, non-partisan dan cara yang transparan, dan sama pentingnya, para pemilih harus memiliki keyakinan terhadap penyelenggaraan mereka. Hal ini membutuhkan EMB yang profesional dengan kebebasan penuh dalam bertindak. bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pemilu kredibel secara teknis dan dianggap bebas, adil dan kredibel. Pekerjaan mereka termasuk beragam jenis kegiatan berbeda, mulai dari menetapkan kelayakan pemilih, mendaftarkan pemilih yang memenuhi syarat, melaksanakan pemungutan suara, dan menghitung serta mentabulasi suara, untuk mengkampanyekan peraturan, pendidikan bagi pemilih dan resolusi perselisihan dalam pemilu. Sehingga, kompetensi dan kredibilitas EMB dapat membentuk persepsi keseluruhan dan kepercayaan dalam integritas pemilu.

Ketiga, pemilu berintegritas menghasilkan wewenang yang sah bagi siapa saja yang menang, dan keamanan politik serta fisik bagi siapa pun yang kalah. Pemilu berintegritas merupakan satu permainan yang dimainkan berulang kali, yang dalam jangka pendek, kekalahannya dapat diatasi melalui organisasi dan mobilisasi jangka panjang. Tantangannya di sini adalah untuk membangun lembaga dan norma persaingan multi-partai dan pembagian kekuasaan yang menunjang demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara pesaing politik dan menjamin bahwa pemilu menyelesaikan konflik daripada meruncingkannya.

Keempat, di seluruh dunia, baik dalam demokrasi yang baru dan lama, halangan menuju partisipasi politik yang setara universal tetap ada. Di banyak negara, perempuan, minoritas dan kelompok lainnya menghadapi hambatan yang terus menerus

terhadap partisipasi dalam proses demokrasi. Menyenggarakan pemilu berintegritas mengharuskan penghapusan hambatan tersebut. Memang, pemilu berintegritas harus menunjang partisipasi seluas mungkin, untuk menganjurkan keterlibatan sipil dan debat yang berada pada jantung persaingan pemilu dan demokrasi deliberatif.

Kelima, keuangan politik yang tak dapat dikendalikan, tertutup dan samar menimbulkan ancaman fundamental terhadap integritas pemilu. Di beberapa negara, kontribusi kampanye langsung dan bentuk lain dari bantuan finansial merupakan bentuk dominan dari pengaruh politik. Ini artinya pemilih berpenghasilan rendah memiliki pengaruh yang semakin sedikit terhadap capaian politik. Di beberapa negara, kejahatan yang terorganisir menemukan bahwa pembiayaan kampanye dapat membeli pengaruh dan perlindungan politik. Di beberapa Negara dengan demokrasi yang lebih lama, praktik keuangan telah merusak kepercayaan publik pada demokrasi dan pemilu. Dalam rangka menghentikan efek korosif pada integritas pemilu dan pemerintahan demokratis, demokrasi harus mengatur dan mengontrol keuangan politik secara ketat.

Strategi untuk mempromosikan dan melindungi Pemilu Berintegritas

Pemerintah, pejabat terpilih dan warga negara dapat mengambil langkah spesifik untuk mempromosikan dan melindungi integritas pemilu. Untuk meningkatkan kecenderungan politikus dan pemerintahan petahana memperkuat integritas pemilu nasional, kami menganjurkan serangkaian komitmen dan tindakan yang saling memperkuat:

- antara pemerintah dan warga negara;
- antar pemerintah yang sependirian;

- antar EMB yang profesional, kompeten dan non-partisan;
- antara organisasi masyarakat sipil domestik dan transnasional; dan
- antara pemberi bantuan, pemerintah penerima, oposisi politik, pengamat pemilu internasional dan dalam negeri serta organisasi masyarakat sipil.

Rekomendasi pada Tingkat Nasional

1. Untuk mendorong dan melindungi integritas pemilu, pemerintah harus:
 - membangun ketaatan hukum dalam rangka memastikan warga negaranya, termasuk pesaing politik dan oposisi, memiliki perlindungan hukum untuk menjalankan hak mereka yang berhubungan dengan pemilu;
 - menghasilkan EMB yang profesional dan kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak, termasuk penjaminan akses yang tepat waktu ke keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu, dan mandat untuk mengelola pemilu yang transparan, yang pantas menerima kepercayaan publik;
 - mengembangkan lembaga, proses dan jejaring yang menghalangi kekerasan berkaitan pemilu dan, jika pencegahan gagal, pelaku kejahatan harus bertanggung jawab;
 - pembaruan dan mendesain sistem pemilu dan menerapkan kebijakan untuk mengurangi “pemenang politik yang memperoleh segalanya”/ politik “winner-take-all”;
 - menghilangkan rintangan pada partisipasi perempuan, kaum muda, minoritas, warga penyandang cacat dan kelompok marjinal tradisional lainnya, serta mengambil langkah tegas untuk memajukan kepemimpinan dan partisipasi

perempuan yang luas, termasuk melalui penggunaan kuota yang bijak; dan

- mengontrol keuangan politik dengan mengatur donasi dan pengeluaran, pembiayaan publik atas kampanye politik, pelaporan dan transparansi donasi dan pengeluaran, serta sanksi dan penalti bagi yang tidak mematuhi.
2. Organisasi rakyat harus memonitor kinerja pemerintah dalam memenuhi tantangan integritas pemilu melalui pemantauan pemilu sistematis dan tidak memihak, sesuai dengan prinsip internasional; melalui tindakan sipil untuk mencegah kekerasan pemilu; melalui pemantauan pertanggung jawaban media, keberagaman dan kemandirian; dan melalui tuntutan agar partai politik menanggapi kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi untuk Menggerakkan Aksi Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Lintas Negara

3. Masyarakat pengamat pemilu harus berkomitmen terhadap standar global untuk pemantauan pemilu dalam negeri dengan Jaringan Global untuk Pemantauan Pemilu Dalam Negeri dan mengikuti Deklarasi Prinsip Global dan Pedoman Perilaku. Pendonor harus berinvestasi pada peningkatan kapasitas dan kredibilitas pengamatan pemilu dalam negeri serta mendukung Jaringan Global dan para anggotanya.
4. Pemerintah harus bergabung dengan negara sependirian dan bermitra dengan organisasi masyarakat sipil yang mereka miliki untuk berpegang pada komitmen yang spesifik berpegang integritas pemilu, pembiayaan pemilu, dan perlindungan terhadap media yang

bebas melalui Kemitraan Pemerintahan Terbuka—sebuah gagasan internasional yang menganjurkan pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka dalam hal transparansi, pertanggungjawaban dan pelibatan semua kelompok.

5. EMB nasional harus menyelenggarakan dan membuat proses sertifikasi global untuk mengevaluasi dan menilai atas profesionalisme, kemandirian dan kompetensi mereka, termasuk mengembangkan prinsip dan pedoman perilaku untuk mengelola pemilu berintegritas secara sukarela.
6. Institusi dan pemangku kepentingan demokratis harus menciptakan dan membiayai organisasi masyarakat sipil transnasional yang baru—Pemilu Integritas Internasional—didedikasikan untuk membawa perhatian global pada negara-negara yang berhasil atau gagal dalam melaksanakan pemilu berintegritas. Organisasi seperti itu bisa digunakan terhadap malpraktik pemilu seperti Transparansi Internasional terhadap korupsi. Hal ini akan dapat mengisi ceruk utama dalam membantu mendorong pertanggungjawaban pada isu-isu pemilu dengan menyediakan informasi, analisis dan kesempatan lainnya untuk meningkatkan tekanan normatif pada pemerintah yang gagal menjalankan pemilu berintegritas.

Rekomendasi pada Tingkat Internasional

7. Pendonor harus memprioritaskan aktivitas pembiayaan, yang disorot dalam laporan ini, untuk meningkatkan dan melindungi pemilu berintegritas, memberikan prioritas untuk membantu negara-negara mengatasi tantangan dalam menyelenggarakan pemilu berintegritas dan berinvestasi dalam

peningkatan kapasitas dan efektivitas pemantauan pemilu dalam negeri.

8. Perhatian internasional dan regional tingkat tinggi harus diarahkan dan kebijakan yang sesuai diambil, untuk mewaspadaai ancaman yang membesar terhadap demokrasi yang ditimbulkan oleh pembiayaan kampanye politik, partai dan kandidat oleh kejahatan terorganisir transnasional.
9. Pemerintahan demokratis, organisasi regional dan organisasi internasional harus memperjuangkan pemilu yang berintegritas sebelum pemilu diselenggarakan. Untuk melakukannya, mereka harus lebih proaktif dan terlibat sepanjang siklus pemilu negara-negara dengan pemilu yang bermasalah. Jika mediasi diperlukan, harus dilakukan dengan baik sebelum pemungutan suara dilaksanakan dan ditujukan untuk menjamin bahwa dalam masyarakat yang terbelah, pemilu tidak menghasilkan pemenang yang mengambil semua hasil/"winner-take-all". Tindak lanjut seharusnya tidak hanya terfokus pada peningkatan teknis tetapi juga harus berupaya mencari jalan membuka dialog dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk proses politik yang demokratis, selain diperlukan, pemilu berintegritas juga perlu untuk diupayakan.
10. Organisasi regional harus membuat dan mengkomunikasikan dengan jelas 'garis merah' mereka—malpraktik pemilu yang mengerikan yang jika dilanggar, akan memicu penjatuhan hukuman dan sanksi multilateral. Organisasi-organisasi ini harus mengambil tindakan jika batasannya dilangkahi.
11. Bantuan donor jangka panjang harus secara eksplisit dikaitkan dengan rekomendasi oleh pemantau pemilu, dimulai sejak awal siklus pemilu

ketimbang sesaat sebelum pemilu yang baru. Harus menjadi praktik yang jamak bahwa di dalam negeri, terdapat dialog pascapemilu antar kelompok pemantau internasional dan dalam negeri, penyelenggara pemilu dan aktor politik yang mengidentifikasi area untuk upaya pembaruan, mempertimbangkan potensi pendampingan internasional untuk pembaruan tersebut, dan meningkatkan kesiapsiagaan bagi pemilu berikutnya. Pemantauan pemilu berikutnya dan rekomendasi yang direvisi kemudian dapat menjadi dasar perubahan dalam strategi pendampingan untuk menjamin bahwa prinsip fundamental integritas pemilu dihargai.

kemerdekaan politik sebagai tonggak pembangunan dan kebutuhan untuk memberikan jangkauan yang lebih luas dan kapasitas bagi masyarakat di mana pun berada untuk berpartisipasi dalam keputusan politik yang mempengaruhi mereka. Kerangka kerja pasca 2015 harus memasukkan program spesifik dan tujuan untuk menghasilkan pemilu berintegritas, dengan penekanan pada pelibatan semua, transparansi dan akuntabilitas.

12. Pendorong sebaiknya mengintegrasikan demokrasi dan integritas pemilu dengan pembangunan dan bantuan keamanan. Pengembangannya harus berkontribusi pada peningkatan pluralisme politik sebagaimana ragam pemerintahan demokratis dan budaya politik yang meremehkan pertarungan pemilu dalam lingkungan yang tidak aman. Pendorong dan negara-negara mitra harus memberikan prioritas pada penguatan berbagai aktor politik yang terlibat dalam proses demokrasi negara, termasuk parlemen, partai politik dalam oposisi dan dalam pemerintahan, media independen dan badan penyelenggaraan pemilu independen. Kerja sama keamanan internasional perlu memberikan pertimbangan yang lebih besar pada kebijakan dan program yang memelihara pluralisme politik dan kompetisi, dalam rangka mempertahankan stabilitas dan demokrasi dalam jangka panjang.
13. Sebagai pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat sipil mempertimbangkan kerangka kerja pembangunan pasca 2015, maka prioritas yang lebih besar harus diberikan pada

“ Pada akhirnya, integritas pemilu merupakan kendala politik. Kekuasaan, dan persaingan untuk kekuasaan, harus diatur. Tidak cukup bagi pemerintah untuk mendirikan lembaga; politisi harus menghargai dan mempertahankan independensi dan profesionalisme pejabat pemilu, hakim dan pengadilan. ”

Bab 1:

Mengapa Pemilu Berintegritas Penting

1. Pada dua dekade terakhir, demokrasi telah menyebar ke penjuru dunia dengan cara yang tak terduga. Demokrasi meningkat dari 48 negara di tahun 1989 hingga 95 saat ini.¹ Termasuk di dalamnya beberapa negara terkaya dan termiskin di dunia, membuktikan bahwa demokrasi bukanlah kemewahan bagi kaum kaya. Aktivis demokrasi dan warga negara biasa di seluruh dunia telah berulang kali membuktikan bahwa demokrasi adalah nilai dan aspirasi universal. Kebangkitan Arab mengkonfirmasi bahwa tuntutan populer bagi demokrasi tidak terikat oleh kawasan, etnis, budaya atau agama.

2. Mungkin, bukti paling menarik bahwa demokrasi merupakan nilai universal berasal dari banyak pemerintah otoriter yang berusaha melindungi mereka dalam kedok legitimasi demokrasi. Pada 12 tahun terakhir, sebagai contoh, semua kecuali 11 negara di dunia, rezim demokrasi dan non-demokrasi, menyelenggarakan pemilu nasional.² Bahkan Cina, yang beberapa pemimpinnya mengkritik demokrasi sebagai nilai Barat, telah bereksperimen dengan pemilu di tingkat lokal.

3. Satu perbedaan antara kedok legitimasi demokrasi dan legitimasi demokrasi murni sendiri yaitu integritas pemilu. Saat pemilu memiliki integritas, prinsip dasar demokrasi dimana kesetaraan politik dihargai; penduduk memilih pemimpin mereka, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Ketika pemilu tak ada integritas, politisi, pejabat dan lembaga tidak bertanggung jawab pada publik, dengan menolak peluang yang setara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses politik. Kepercayaan publik pada pemilu akan melemah, dan pemerintah akan kurang legitimasinya. Pada kasus-kasus seperti ini, lembaga demokrasi merupakan tempurung kosong, kehilangan etos dan semangat demokrasi.

Apa dengan Integritas Pemilu?

4. Bagi kebanyakan orang, integritas merujuk pada 'sesuatu yang tak dapat disuap atau kepatuhan yang kukuh pada pedoman nilai moral'.³ Untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki integritas yang luar biasa adalah dengan mengatakan bahwa ia dipandu oleh pedoman etika dan tidak dapat disuap dengan pertimbangan materi atau kepentingan picik.

5. Ketika diberlakukan pada pemilu, integritas menyiratkan kepatuhan pada prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik yang disusun dalam perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. Hak pilih universal dan kesetaraan politik berarti bahwa semua pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam debat publik mengenai proses pemilu, membangun preferensi politik mereka melalui akses tak terbatas ke beragam sumber media independen, menyalurkan preferensi mereka melalui pemungutan suara dan suara mereka dihitung secara sama. Kesetaraan politik juga membutuhkan penghargaan atas hak untuk mencari pemilu dan tingkatan arena bermain yang sama bagi para kandidat politik dan partai politik, termasuk akses yang sama ke media, forum publik untuk adu debat dan keuangan politik.

6. Integritas juga memiliki dua arti lainnya yang relevan terhadap pemilu. Keduanya merujuk pada 'kesempurnaan atau kondisi kokoh', seperti saat kita mengatakan bahwa sebuah bangunan memiliki integritas struktural. Berbicara mengenai pemilu berintegritas berarti merujuk pada pemilu yang dilaksanakan secara kompeten dan profesional. Ketika pemilu tidak diselenggarakan dengan benar, terlepas dari tujuannya, hambatan untuk memilih

mungkin meningkat, warga negara mungkin kehilangan kepercayaan bahwa suara mereka telah dihitung secara sama dan hasilnya mungkin kurang memiliki integritas.

7. Akhirnya, integritas juga merujuk pada 'kelengkapan atau keadaan menjadi lengkap', seperti saat kita membicarakan tentang integritas teritorial. Ini artinya juga berhubungan dengan pemilu, karena memaksa bahwa kesempurnaan dan praktik etika harus dipertahankan di segenap siklus pemilu, bukan hanya pada hari pemilihannya sendiri. Pakar pemilu memiliki pepatah kuno bahwa 'hanya amatir yang mencuri pemilu pada hari pemilihan'. Integritas pemilu harus mencakup *semua poin dalam siklus pemilu, begitu pula kelembagaan utama dan pilihan kebijakan yang berhubungan dengan sistem pemilu, persaingan dan capaian.*

8. Dengan bersama-sama membawa ketiga arti integritas ini *kami mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan dalam standar dan perjanjian internasional, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan pengelolaannya melalui siklus pemilu.*

Mengapa Pemilu Berintegritas Penting

9. Pemilu berintegritas penting bagi nilai-nilai yang kami junjung tinggi—hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Pemilu memberi kehidupan pada hak yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berasosiasi secara damai, hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan satu negara melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, hak untuk akses yang sama ke layanan publik di satu negara, pengakuan bahwa kewenangan pemerintah berasal dari keinginan rakyat, diekspresikan dalam 'pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia.'

10. Pemilu merupakan hal mendasar bagi etos dan prinsip demokrasi. Pemilu menciptakan peluang bagi individu untuk mengidentifikasi dan mengejar preferensi politik mereka, berpartisipasi dalam proses politik dan meminta pertanggungjawaban dari perwakilan mereka tanpa rasa takut akan penindasan atau kekerasan. Pemilu memberikan warga negara media untuk berdiskusi, berdebat dan mengedukasi mereka mengenai isu utama pemerintahan, membuat persaingan secara bebas dan terbuka serta kampanye politik sebagaimana pentingnya aksi memberikan suara itu sendiri.

11. Karena pemilu menegakkan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi, maka harus dilaksanakan dengan integritas. Ketika pemilu tak ada integritas, pejabat pemilu tidak bertanggung jawab pada publik dan kandidat politik, serta pemberi suara menolak peluang yang setara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses politik. Warga negara kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi ketika

pemilu tidak inklusif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika pemilu memiliki integritas, mereka menunjang demokrasi, menghargai hak-hak fundamental dan menghasilkan pejabat terpilih yang kemungkinan besar mewakili kepentingan warga negara.

12. Tetapi di samping untuk mengangkat nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia, pemilu berintegritas dapat juga memberi manfaat nyata pada para penduduknya. Bukti dari seluruh dunia mengindikasikan bahwa pemilu berintegritas penting untuk memberdayakan perempuan, memerangi korupsi, memberikan pelayanan pada kaum miskin, meningkatkan pemerintahan dan mengakhiri perang saudara. Untuk lebih jelasnya, pemilu berintegritas tidak dapat membangun ekonominya sendiri, menciptakan pemerintahan yang baik atau membuat suasana damai, tetapi riset baru-baru ini menyarankan bahwa pemilu yang ditingkatkan dapat menjadi langkah katalis menuju perwujudan potensi transformatif demokrasi.

13. Sebagai contoh, studi di lebih 800 pemilu pada 97 negara sejak 1975 menunjukkan, bahwa pemilu dengan integritas yang lebih besar diasosiasikan dengan kekalahan telak pemilu dari pemerintah petahana yang berkinerja buruk pada pertumbuhan ekonomi dan kebebasan sipil, jauh sebelum pemilu.⁴ Riset mengkonfirmasi mengenai yang seharusnya diharapkan setiap orang: pertanggungjawaban pemilu—kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban petahana atas kinerja pemerintahan mereka melalui pemilu—tergantung pada kualitas pemilu.

14. Pertanggungjawaban pemilu, pada gilirannya, diasosiasikan dengan mengurangi korupsi pemerintah. Di Brazil, sebagai contoh, para cendekia menemukan bahwa meningkatnya pertanggungjawaban pemilu secara signifikan mengurangi korupsi

dari politisi petahana, terutama ketika terdapat akses publik yang lebih luas pada informasi mengenai kesalahan finansial yang dilakukan petahana. Peraturan yang meningkatkan pertanggungjawaban politik dapat mengurangi biaya korupsi Brazil sebanyak trilyunan dolar per tahun.⁵ Penemuan ini didukung oleh studi lainnya yang menunjukkan hubungan statistik yang signifikan antara kecurangan pemilu dan kebijakan ekonomi serta pemerintahan yang buruk.

15. Pada gilirannya, pertanggungjawaban pemilu memiliki manfaat langsung untuk meningkatkan perwakilan kelas bawah. Studi lainnya dari Brazil menunjukkan bahwa meningkatkan proses pemilu untuk menaikkan kemampuan pemilih yang miskin dan buta huruf untuk berpartisipasi, menyebabkan rakyat yang lebih miskin dan kurang berpendidikan terpilih menjadi legislator daerah, pengeluaran pemerintah bergeser ke layanan kesehatan publik, dan terutama, meningkatkan penggunaan layanan kesehatan yang mengurangi kelahiran dengan bobot rendah di antara para ibu yang kurang berpendidikan.⁶ Pemilu berintegritas dapat memberi lebih dari sekadar pertanggungjawaban. Di Indonesia, peneliti menemukan bahwa desa-desa yang dulunya melaksanakan pemilu langsung untuk memilih proyek infrastruktur mengalami persepsi lebih baik mengenai keadilan, legitimasi dan kepuasan terhadap proyek mereka daripada desa yang tidak memilih untuk proyeknya.⁷ Pemilu berintegritas tidak dapat menciptakan pembangunan ekonomi sendiri, namun mereka dapat membantu memberikan manfaat konkrit pembangunan.

16. Bahkan di negara-negara yang muncul akibat perang saudara—konteks paling sulit dari membangun demokrasi—riset kini menunjukkan bahwa ketika perang dihentikan dan diikuti oleh pemilu dimana mantan pejuang mencalonkan diri untuk

dipilih dan berkampanye untuk mendapatkan suara, kecil kemungkinannya negara-negara tersebut kembali ke situasi perang saudara.⁸ Namun, saat yang bersamaan, studi lainnya mencatat bahwa pemilu yang curang berkorelasi dengan kekerasan masyarakat dan ketidakstabilan politik. Hal ini menganjurkan agar demokrasi memainkan peranannya dalam mendukung resolusi sosial dan konflik politik tanpa kekerasan, maka integritas pemilu merupakan hal yang vital.⁹

Mengapa Sekarang?

17. Pemilu dilaksanakan di negara-negara demokratis, otoriter dan konflik. Pemilu dapat memperpanjang demokrasi, pembangunan, hak asasi manusia dan keamanan—atau merusaknya—dan untuk alasan ini sendiri, mereka harus diberi perhatian dan prioritas. Ekonomi global dan tren politik sekarang ini membutuhkan perhatian seperti itu.

18. Pertama, terdapat kebutuhan untuk mengkonsolidasi keuntungan demokrasi pada dua dekade terakhir. Banyak negara yang menganut demokrasi pada 20 tahun terakhir, kini berjuang untuk mengkonsolidasikan pemerintahan yang demokratis. Semuanya di bawah tekanan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.

19. Kedua, resesi global dan ketidaksamaan bangkitnya ekonomi memberikan tekanan pada demokrasi model lama yang menunjukkan bahwa mereka relevan terhadap persoalan penduduk dan kesejahteraan. Pada beberapa negara dengan demokrasi yang sudah kuno, keyakinan dan kepercayaan publik pada lembaga demokratis telah menurun drastis.

20. Ketiga, di jazirah Arab, ketika hak asasi manusia dan aspirasi demokrasi telah lama dihalangi, kini warga negara memiliki kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengubah transisi

revolusioner ke bentuk pemerintahan demokratis, namun juga menghadapi perangkat yang berbahaya.

21. Keempat, bangkitnya keuangan politik yang tak dapat dikendalikan mengancam untuk meruntuhkan demokrasi di mana saja di dunia ini, dan merampas kekuatan unik demokrasi dibandingkan dengan kekuatan bentuk pemerintahan lain—kesetaraan politik, pemberdayaan orang-orang yang tercabut hak pilih dan kemampuan untuk mengelola konflik masyarakat secara damai.

22. Pemilu berintegritas tidak akan, serta merta, mengkonsolidasikan demokrasi, membangun kembali kepercayaan rakyat pada demokrasi atau menjamin transisi ke demokrasi, namun pemilu bisa menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan integritas pemilu sangatlah penting bagi pendalaman demokrasi.

23. Dengan diberikannya tantangan tata kelola pemerintahan di tengah-tengah krisis ekonomi, maka hal ini berguna untuk mengingatkan para pembaca mengenai satu nilai yang luar biasa dari demokrasi: peningkatan debat publik dan penalaran. Pemilu memelihara debat publik mengenai isu yang menonjol dan cara penyelesaiannya. Kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan memerlukan debat, informasi dan interaksi antar warga, semuanya yang berpotensi untuk mengubah pikiran rakyat dan mengizinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang otoritatif. Ketika dilaksanakan dengan integritas, proses pemilu berada pada jantung kemampuan demokrasi untuk menyusun dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.¹⁰

24. Fokus pada pemilu berintegritas kini sesuai untuk satu dan banyak alasan lainnya. Warga negara, organisasi non-pemerintah, organisasi internasional dan pemerintah mulai memperdebatkan

kerangka pembangunan yang harus menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) setelah 2015.

25. Kami berharap bahwa laporan kami akan mempengaruhi perdebatan. Kami yakin bahwa setelah sekian lama, konsep pembangunan telah dibatasi pada bidang ekonomi. Dalam menantikan dunia setelah 2015, kami yakin bahwa saatnya telah matang untuk menerima konsep pembangunan sebagai kebebasan, dengan isu seperti hak, ketaatan hukum, pemerintahan demokratis, partisipasi politik dan pemberdayaan warga negara merupakan sesuatu yang esensial, elemen utuh pembangunan. Pemilu berintegritas merupakan instrumen untuk memperkuat pembangunan karena dipahami secara konvensional, namun juga untuk memperluas konsep pembangunan untuk memasukkan pilihan yang lebih luas dan dalam dari kebutuhan manusia.

Pendekatan Komisi

26. Integritas pemilu dihasilkan dari pilihan, tindakan dan kapasitas para pemimpin nasional, politikus dan warga negaranya. Dukungan untuk pemilu berintegritas dapat berasal dari atas ke bawah, dikendalikan dan diinspirasi oleh para pemimpin yang berusaha menghargai hak asasi manusia, memberdayakan warga negara biasa dan mendirikan lembaga yang transparan, inklusif dan akuntabel. Seringnya, bagaimanapun, perjuangan berasal dari bawah ke atas, ketika warga negara dan organisasi masyarakat sipil menuntut pemilu berintegritas. Semangat, mobilisasi dan tekanan pada warga negara menghasilkan dorongan politik bagi para pemimpin untuk bertindak secara demokratis. Apapun caranya, integritas

pemilu dan legitimasi yang mengalirkan hal-hal tersebut harus dikembangkan sendiri dan dilindungi. Pemilu berintegritas, sebagai perwujudan demokrasi dan penentuan nasib sendiri, harus dimiliki secara lokal.

27. Di saat yang bersamaan, demokrasi merupakan nilai universal dan pemilu merupakan bagian universal dari hak asasi manusia. Kerap kali, pelaku internasional telah berupaya merusak integritas pemilu, namun hal ini dapat dan harus menjadi sesuatu di masa lalu. Tindakan internasional dapat memperkuat pelaku pembaruan demokratis, mendukung rakyat nasional dan organisasi masyarakat sipil yang menuntut pemilu berintegritas, dan membantu demokrat setempat membangun lembaga yang kuat untuk menopangnya. Untuk melakukannya, aktor internasional harus memperlakukan pemilu berintegritas sebagai hal penting bagi pembangunan dan keamanan, dan mendekati pemilu secara koheren dan strategis—bukan sebagai renungan atau gangguan.

28. Integritas pemilu sering diperlakukan sebagai kendala teknis yang dapat dipulihkan melalui pelaksanaan terbaik dan kapasitas keorganisasian. Di beberapa negara, mungkin terjadi seperti ini, tetapi tak jarang, kenyataannya lebih rumit. Pada akhirnya, integritas pemilu merupakan permasalahan politik. Kekuasaan dan persaingan untuk kekuasaan, harus diatur. Tidak cukup bagi pemerintah untuk mendirikan lembaga; politisi harus menghargai dan mempertahankan independensi dan profesionalisme pejabat pemilu, hakim dan pengadilan. Riset baru-baru ini mengenai pemerintahan menunjukkan bahwa pembaruan umumnya gagal jika 'tak menyentuh kekuatan politik yang mendasarinya' yang menghambat pembangunan dan demokrasi.¹¹

29. Integritas pemilu juga dapat bersifat politis, karena integrasi tergantung pada keyakinan publik dalam proses pemilu dan politik. Tidak cukup untuk mereformasi lembaga; warga negara perlu diyakinkan bahwa perubahan itu nyata dan layak mendapatkan keyakinan mereka. Inklusivitas, transparansi dan pertanggungjawaban, semuanya hal yang fundamental untuk membangun kepercayaan. Tanpa transparansi, tidak ada jalan bagi warga negara untuk mengetahui bahwa pemilu tersebut murni. Harus ada mekanisme efektif dan ganti rugi untuk keluhan warga negara. Ketiadaan pertanggungjawaban menghasilkan sinisme dan memperkuat apatisme warga negara dan ketidakmampuan memberikan hasil yang diinginkan.

“Keuangan politik tidak mendapatkan perhatian dan komitmen untuk reformasi yang layak. Dalam dunia yang peningkatan ekonominya tidak setara, konsentrasi yang lebih banyak pada kemakmuran dalam demokrasi dan resesi ekonomi global, keuangan politik merupakan tantangan yang hanya akan tumbuh jika terlihat signifikan.”

Bab 2:

Tantangan Utama Pemilu Berintegritas

30. Tantangan pada pemilu berintegritas dapat ditemui di setiap demokrasi dan tidak terbatas pada negara miskin, terpecah belah atau yang dilanda perang. Memang, ancaman hebat pada pemilu berintegritas di demokrasi yang telah mapan merupakan kepuasan tersendiri dari tantangan ini.

Kami menekankan pada lima tantangan: membangun ketaatan hukum, menciptakan badan penyelenggaraan pemilu profesional (EMB), membangun demokrasi sebagai sistem keamanan bersama, menghilangkan rintangan terhadap partisipasi politik dan mengendalikan keuangan politik.

31. Pemilu merupakan ujian bagi hak asasi manusia. Dimulai dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, terdapat prinsip, standar, hak dan peraturan yang sudah didefinisikan dengan baik yang dilakukan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu berintegritas. Prinsip tersebut fundamental, namun semuanya bergantung pada peraturan hukum, yang tanpanya, standar, prinsip, kerangka hukum—hak itu sendiri—tidak dapat dibenarkan.¹²

32. Untuk pemilu berintegritas, mereka harus dilakukan secara kompeten dengan cara yang profesional, non-partisan, transparan dan semuanya harus dirasakan oleh pemberi suara. Lembaga utama untuk mengembangkan dan melindungi pemilu berintegritas adalah EMB yang profesional dan independen. EMB bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pemilu kredibel secara teknis dan *dianggap* sah dan kredibel.

33. Pemilu berintegritas menghasilkan otoritas yang sah bagi siapa saja yang menang, dan keamanan politik serta fisik bagi siapa pun yang kalah. Pemilu berintegritas merupakan satu permainan yang dimainkan berulang kali, yang dalam jangka pendek, kerugiannya dapat diatasi melalui organisasi dan mobilisasi jangka

panjang. Tantangannya di sini adalah untuk membangun lembaga dan norma persaingan multi-partai dan pembagian kekuasaan yang menunjang demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara pesaing politik dan menjamin bahwa pemilu menyelesaikan konflik daripada meruncingkannya.

34. Mengingat bahwa pemilu berintegritas harus menegakkan prinsip kesetaraan politik dan hak pilih universal, warga negara di banyak negara demokrasi masih menghadapi rintangan atas partisipasi universal dan kesamaan politik. Di seluruh dunia, perempuan sangat tidak diwakili dalam jabatan politik dan kepemimpinan partai politik, dan mereka dicoba dihalangi dari partisipasi politik. Di beberapa negara, minoritas menghadapi hambatan untuk memilih dan dirampas hak berpolitiknya. Menyelenggarakan pemilu berintegritas mengharuskan penghapusan hambatan tersebut.

35. Pada akhirnya, keuangan politik yang tak dapat dikendalikan, tertutup dan samar menimbulkan ancaman fundamental terhadap integritas pemilu. Di beberapa negara, kontribusi kampanye langsung dan berbagai bentuk lain dukungan keuangan merupakan bentuk dominan dari pengaruh politik. Ini artinya, pemilih dengan penghasilan rendah memiliki kapasitas yang semakin sedikit untuk mempengaruhi capaian politik. Kejahatan transnasional yang terorganisir menemukan bahwa pembiayaan kampanye dapat membeli pengaruh dan perlindungan politik. Di beberapa demokrasi yang lebih lama, praktik keuangan telah merusak kepercayaan publik dalam demokrasi dan pemilu. Untuk menyampaikan tantangan fundamental pemilu berintegritas, demokrasi harus mengendalikan keuangan politik.

Membangun Ketaatan Hukum

36. Integritas pemilu bergantung pada ketaatan hukum—kapasitas dan norma

yang menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab secara hukum, bahwa semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, bahwa legislator dan penegakkannya tidak sewenang-wenang, dan bahwa hukum menghargai hak asasi manusia.¹⁵ Ketika diberlakukan pada pemilu, ini artinya tindakan harus diambil melawan petahana atau kepentingan politik yang berkedudukan kuat yang berusaha memanipulasi proses pemilu. Pengadilan independen yang kuat diperlukan untuk melindungi hak semua pemilih, partai politik dan kandidat, untuk memperkuat prosedur pemilu yang bebas dan adil, dan untuk mengusut pelanggaran atas proses pemilu. Agar pemilu memiliki integritas, maka keadilan pemilu harus dilaksanakan dan warga negara harus melihat bahwa hal tersebut telah dilaksanakan.

37. Peraturan hukum merupakan hal yang fundamental untuk menyelenggarakan pemilu berintegritas, karena ini memfasilitasi langkah-langkah untuk mengatasi tantangan lainnya pada pemilu. EMB harus melaksanakannya tanpa memihak, bahkan yang berkuas yang menolak EMB harus menghargai penilaian mereka. Menciptakan keamanan bersama di antara pesaing politik akan lebih mudah jika mereka yakin akan ketidakberpihakan, pengadilan independen dan polisi. Mengatasi rintangan terhadap partisipasi pemilu melalui penggunaan kuota yang terpilih akan terlihat lebih sah jika alasan di belakang kuota ini tidak tampak sewenang-wenang. Mengendalikan keuangan politik memerlukan kepercayaan bahwa pengadilan akan membebani para pesaing dengan tugas yang sama.

38. Kami tidak ingin mengartikan bahwa membuat ketaatan hukum itu mudah atau bisa dilakukan dalam semalam. Tidak ada manual teknis untuk pembuatannya, sebuah ilusi bahwa itu hanyalah proses teknis yang mengacaukan pembuatannya. Ketaatan hukum sangat politis, karena mengubah dan

membatasi penggunaan kekuasaan.

Juga sangat sosial dan kultural, karena kinerja terbaiknya bukan melalui penegakan dan pemaksaan, tetapi melalui kepatuhan setiap harinya.¹⁴ Kami bersikeras, bagaimanapun, bahwa pejabat terpilih memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan ketaatan hukum, perilaku mereka dalam menerima hukum, terutama ketika bertentangan dengan kepentingan mereka, sebuah model yang sangat ampuh bagi rakyat untuk meniru interaksi sehari-hari mereka dengan hukum.

Menciptakan EMB Profesional dan Mandiri

39. Agar pemilu memiliki integritas, maka mereka harus, dan harus dirasakan oleh pemilih, sebagai sesuatu yang non partisan, yang dilaksanakan secara kompeten dengan cara profesional. Lembaga utama untuk mengembangkan dan melindungi pemilu berintegritas adalah EMB profesional dan independen yang melaksanakan proses transparan. EMB bertanggung jawab menjamin bahwa pemilu kredibel secara teknis dan dianggap bebas, adil dan kredibel. Pekerjaan mereka termasuk beragam kegiatan mulai dari menentukan kelayakan pemilih, mendaftarkan pemilih yang memenuhi syarat, melaksanakan pemungutan suara, menghitung dan mentabulasi suara, mengampayekan peraturan, pendidikan bagi pemilih dan resolusi terhadap perselisihan pemilu.

40. Kompetensi dan persepsi populer EMB dan staf mereka lalu dapat membentuk persepsi keseluruhan dan kepercayaan dalam integritas pemilu. Sebagai contoh, kurang cepat atau kurang transparan dalam menangani keluhan pemilu dapat meningkatkan risiko salah informasi, kerusakan dan bahkan kekerasan, merusak legitimasi proses pemilu. Legitimasi dan EMB yang kredibel sangat penting pada negara yang muncul akibat perang saudara atau negara dengan sejarah pembagian sosial dan kekerasan politik yang baru.

Lembaga pemilu Kenya 2007-8 yang dimanipulasi dan kekerasan pasca-pemilu

Kekerasan pasca pemilu tahun 2008 di Kenya mengagetkan banyak orang. Sudah sejak lama negara ini dikenal dengan lembaga pemilu yang profesional dan stabilitas politiknya, dan umumnya di masa lampau, pemilu di sana berjalan dengan damai. Tetapi saat Pemilu Presiden Desember 2007, Komisi Pemilihan Umum Kenya (ECK) gagal secara dramatis untuk menjaga reputasinya. Setelah pemilihan berakhir, ECK menunda pengumuman hasil selama dua hari. Juga, hasil pemilihan menunjukkan selisih yang sangat besar antara jumlah suara pemilu presiden dan parlementer. Dikarenakan selisih ini diamati terutama pada kubu Presiden Mwai Kibaki, maka hal itu dilihat oleh banyak orang sebagai bukti pengelembungan suara Kibaki. Terlepas dari tuduhan penyimpangan yang meluas, ECK mengumumkan pemilu yang dimenangkan Kibaki tanggal 30 Desember dan diambil sumpahnya di hari yang sama, yang dengan segera menimbulkan protes dari oposisi dan memicu kekerasan yang mengganggu negara selama dua bulan setelahnya.

Kinerja buruk ECK diikuti serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintahan Kibaki yang merusak kemerdekaan dan

ketidakberpihakannya. Dari persiapan menjalankannya hingga sampai pemilu, Presiden Kibaki telah menunjuk 19 dari 22 anggota ECK, bertolak belakang dengan 'perjanjian lisan' tahun 1997 yang disediakan bagi perwakilan multi-partai di Komisi. Mantan pengacaranya yang menjadi wakil ketua Komisi dan yang dahulunya dilihat sebagai salah satu EMB yang paling diandalkan di kawasan tersebut sangat dipolitisasi. Sebagai tambahan, dua hari sebelum pemilu, Kibaki menunjuk lima hakim baru di Pengadilan Tinggi, yang memiliki mandat untuk mendengarkan perselisihan pemilu.¹⁵

Ketidakpercayaan terhadap lembaga utama negara ini menutup kemungkinan tanggapan prosedural oleh oposisi terhadap dugaan malpraktik pemilu, alih-alih menghasilkan kekerasan dan krisis politik yang menyebar luas yang sebelumnya dianggap sebagai negara demokratis nan stabil. Pada akhirnya, lebih dari 1.150 orang terbunuh dan sekitar 350.000 mengungsi dari rumah mereka.¹⁶ Hal ini membuat pihak internasional campur tangan di bawah pimpinan Panel Uni Afrika dari tokoh-tokoh unggulan, dipimpin oleh Kofi Annan, untuk membawa para rival politik ke meja perundingan.

Transparansi dan Kekuatan Kelembagaan di Ghana

Dalam berbagai cara, pemilu presiden Ghana tahun 2008 sangat mirip dengan pemilu di Kenya setahun sebelumnya. Keduanya menampilkan persaingan panas yang dilatarbelakangi sentimen etnis kental di negara yang dikenal dengan kestabilan politiknya. Walaupun manipulasi lembaga pemilu di Kenya mempercepat meluasnya kekerasan, sejarah penyelenggaraan pemilu yang dapat diandalkan dan transparansi memungkinkan Ghana untuk menavigasi situasi politik yang tegang dengan kekerasan yang relatif sedikit, berarah pada transfer kekuasaan yang sah dan melanjutkan stabilitas.

Tahun 2008, dua kandidat presiden utama, Nana Akufo-Addo dari Partai Patriotik Baru (New Patriotic Party) dan John Atta Mills dari Kongres Nasional Demokrat (National Democratic Congress), posisinya sangat berdekatan satu sama lain di jajak pendapat. Akufo-Addo gagal dengan kurang dari poin satu persen untuk mayoritas putaran pertama di awal Desember, memaksa adanya pemilu penentuan di penghujung bulan. Retorika meningkat dalam minggu-minggu intervensi tersebut, dan banyak yang mengkhawatirkan kampanye yang panas dapat mengarah pada kekerasan, namun Komisi Pemilu mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi tensi dan membangun kepercayaan dalam kinerjanya dan integritas hasil tersebut, sebagai contoh

dengan mengganti pekerja pemungutan suara yang gagal untuk mengikuti prosedur di putaran pertama.¹⁷ Ketika surat suara penentuan pemilu menghasilkan Mills yang menang dengan 50.000 suara, langkah-langkah ini membantu meyakinkan partai yang kalah untuk menerima hasilnya. Sebagai tambahan, masyarakat sipil dikelola dan melaksanakan apa yang dianggap sebagai upaya pemantauan yang sangat berhasil, yang termasuk tabulasi suara paralel untuk kedua putaran pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Ghana, Dr Kwadwo Afari-Gyan, memuji di depan umum upaya pemantauan pemilu rakyat oleh Pusat Pembangunan Demokratis Ghana, dan mitranya dalam Koalisi Pengamat Pemilu Dalam Negeri, sebagai faktor penting yang memperkuat kerja Komisi Pemilihan umum dan mengurangi volatilitas dalam lingkungan pemilu.

Secara fundamental, kemampuan Komisi Pemilihan Umum Ghana untuk menyelenggarakan keberhasilan pemilu yang ketat seperti itu berakar pada rasa menghargai bertahun-tahun dan kemerdekaan dari para aktor politik lainnya di Negara tersebut. Dengan membangun rekam jejak kompetensi dan profesionalisme, sementara secara simultan memelihara independensi dari pengaruh yang salah, Komisi mampu membangun modal politik yang dapat dipergunakan jika diperlukan tahun 2008.

41. Di seluruh dunia, terjadi kebangkitan yang mengesankan bahwa EMB yang independen dan profesional yang dijiwai oleh etos demokrasi dan profesional. Pada saat bersamaan, beberapa EMB tetap, atau paling tidak dianggap menjadi, bagian dari penguasa dan partai mereka. Bahkan mereka yang memiliki kecakapan teknik dan profesionalisme kerap kali menghadapi campur tangan politik yang dapat mencegah mereka melakukan pekerjaannya secara efektif. Inilah kegagalan politik: secara sepintas lalu, EMB seperti itu tampak seperti badan yang mendukung integritas pemilu, namun sedikit sekali perilakunya yang menunjang keyakinan warga negara dalam proses pemilu dan gagal untuk memenuhi standar transparansi, partisipasi dan pertanggungjawaban.

42. Pemerintah dan parlemen dapat mengambil tindakan khusus untuk mendukung keyakinan warga negara pada integritas EMB dan EMB dapat mengambil tindakan mereka sendiri: kerangka hukum dan prosedur penganggaran dapat membantu memastikan ketidakberpihakan, pertemuan publik dapat menunjang keyakinan warga negara dan membuat informasi menjadi konsumsi publik dengan tepat pada waktunya turut membantu memberikan transparansi. Ketika EMB tidak mengadopsi kebijakan tersebut, hal ini dikarenakan pemerintah nasional dan politikus menolak perubahan kosmetik politik dan benar-benar menganut etos demokrasi yang dapat membuat EMB efektif. Kuncinya bukan pada kemerdekaan formal, tetapi kemerdekaan sejati dari suatu tindakan.

Membangun Keamanan Bersama

43. Ketika pemilu memiliki integritas, maka pemerintahan yang dihasilkan akan dibatasi oleh ketaatan hukum dan partai yang kalah serta pendukungnya bebas untuk berpartisipasi dalam aktivitas

politik tanpa intimidasi atau ancaman kekerasan. Serupa, petahana dan para pendukungnya tidak perlu takut akan pembalasan kekerasan jika mereka kehilangan kekuasaan. Demokrasi dengan integritas pemilu menciptakan permainan berulang yang dalam hal ini, lebih baik bagi aktor politik dan kelompok untuk mengambil bagian dalam proses pemilu daripada kembali ke perjuangan dengan kekerasan, membantu menjamin tingkat keamanan bersama bagi semuanya.

44. Agar pemilu memberikan keamanan bersama ini, negara-negara harus mengatasi dua tantangan. Pertama yaitu menjamin bahwa pemilu itu sendiri sejatinya adalah media tanpa kekerasan dari persaingan politik. Walaupun pemilu ditujukan sebagai forum penuh damai yang mendebat kebijakan dan prioritas masyarakat, pada beberapa negara, hal ini jelas tidak terjadi. Tantangan kedua yaitu menjamin bahwa pemilu bukanlah kompetisi politik dimana pemenang memperoleh segalanya dan dalam hal ini, lebih baik untuk kembali ke perjuangan dengan kekerasan daripada menerima kekalahan pemilu dan konsekuensi potensialnya.

Tantangan Kekerasan Pemilu

45. Sejak 1960, kekerasan fatal telah menjangkiti lebih dari 20 persen pada semua pemilu presidensial dan parlementer yang diselenggarakan di seluruh dunia. Antara 1985 dan 2005, hampir setengah negara yang menyelenggarakan pemilu melihat pemilu berkaitan dengan kekerasan pada saat bersamaan atau pada saat yang berbeda.¹⁸ Sementara kekerasan tidak memiliki penyebab atau karakteristik yang seragam, namun mewakili tantangan utama terhadap integritas pemilu di seluruh dunia.

Kekerasan Pasca-Pemilu di Nigeria, 2011

Nigeria telah mengalami kekerasan pemilu kronis sejak masa transisi ke demokrasi dan pemerintahan sipil tahun 1999, termasuk lebih dari 15.700 kematian berkaitan dengan pemilu.¹⁹ Taruhan yang tinggi digabungkan dengan senjata yang siap sedia untuk disewa dalam bentuk gang pengorganisir kekerasan dan sejarah kurangnya penegakan hukuman bagi pelaku kejahatan membuat kekerasan pemilu menjadi media yang relatif menarik untuk persaingan pemilu—bahkan dalam partai politik.

Kemajuan penting dibuat pada pemilu 2011 dalam hal memprofesionalkan Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen (INEC) Nigeria, yang terpenting melalui penunjukan akademisi yang dihormati sebagai ketuanya.²⁰ Profesor Attahiru M. Jega, yang dikenal dengan ‘Bapak Integritas’, mengubah proses registrasi pemilih, meningkatkan transparansi di Komisi dan untuk pertama kalinya menindak

pejabat pemerintahan (termasuk pejabat INEC) atas malpraktik pemilu.²¹

Sayangnya, pengelolaan pemilu dan transparansi yang telah ditingkatkan tidak cukup mencapai pengurangan besar kekerasan di beberapa wilayah. Selama persiapan hingga pemilu, 165 orang telah terbunuh dalam kekerasan berkaitan dengan kampanye politik dan pendaftaran pemilih. Sejumlah 800 hingga 1.000 orang lainnya meninggal setelah pecahnya protes dan menyebar ke bagian utara atas pernyataan kemenangan Presiden yang berkuasa, Goodluck Jonathan. Lebih dari 65.000 diungsikan.²²

Kekerasan ini merupakan kegagalan politik dalam menghadapi apa yang sebagian besar merupakan keberhasilan teknis dan administrasi. Kandidat yang kalah dan pemimpin partai gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk mengendalikan pendukung mereka dan menerima hasil pemilu.

46. Kekerasan bukan sekadar masalah bagi demokrasi baru selama fase transisi. Tidak ada jaminan bahwa kekerasan yang berkaitan dengan pemilu akan hilang seiring waktu berjalan sebagaimana negara memperoleh lebih banyak pengalaman dari proses pemilu. Melainkan, kekerasan pemilu adalah fungsi dari lembaga yang lemah atau korup dan tak jarang itu merupakan satu elemen dalam kekerasan politik dengan pola yang lebih luas.

47. Kekerasan pemilu lebih cenderung dalam konteks lembaga seperti pengadilan, sistem keadilan kriminal, kekuatan keamanan dan media yang korup atau

terlalu lemah untuk melaksanakan bagian mereka dalam menghadapi kekerasan dan intimidasi. Pengelompokan etnis, transisi pasca konflik, ketidakrataan ekonomi atau kemiskinan menyebabkan tekanan sosial yang memberikan tekanan pada proses demokrasi, namun hanya akan membawa ke kekerasan pemilu ketika lembaga pendukung yang diperlukan untuk integritas pemilu lemah, korup, atau tidak pada tempatnya.

48. Kekerasan yang berkaitan dengan pemilu yang diarahkan pada individu warga negara biasanya ditujukan untuk menekan jumlah suara untuk mempengaruhi hasil pemilu. Terkadang hal ini digunakan untuk memaksa rakyat memilih dengan cara tersendiri atau ganjaran atas suara yang ‘salah jalan’. Kekerasan ditujukan kepada kandidat dan partai politik ditujukan untuk membatasi pilihan pemilih. Kekerasan yang menasar pejabat pemilu biasanya ditujukan untuk mengganggu suara atau menyusun taktik menyusup TPS atau pusat penghitungan. Taktik tersebut umumnya melibatkan sedikit orang dan menasar individu sebelum hari pemilihan.

49. Mobilisasi orang dalam skala besar untuk memprotes hasil pemilu menasar lembaga pemilu, dan terkadang lembaga negara lainnya, dengan tujuan memutarbalikkan hasil resmi pemilu atau mencegah potensi pencurian pemilu. Tindakan tersebut tidak sepenuhnya diharapkan untuk menjadi kekerasan, walau bisa saja itu yang terjadi. Kerap kali, itu upaya untuk memprotes kurangnya integritas pemilu, walau mereka bisa dikelola untuk tujuan yang keji. Kekerasan dikaitkan dengan tindakan-tindakan ini sering datang dari kekuatan keamanan yang menggoda untuk melanggengkan mereka yang berkuasa (walau kadang merupakan hasil dari sebab lainnya, seperti tindakan berlebih oleh kekuatan keamanan, atau aksi-aksi dari provokator). Ketika kekerasan pasca konflik terjadi pada kondisi seperti ini, sering kali brutal.

50. Pemulihan untuk situasi ini berbeda, namun penekanannya harus bisa mencegah terjadinya kekerasan, dan meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan jika terjadi. Kekerasan pra pemilu yang didasarkan pada individu dapat ditolak melalui kampanye anti kekerasan dan melalui pemantauan alokasi keamanan dan sumber daya penyelenggara pemilu, dengan peringatan dini mengenai ketidakteraturan. Di Kenya, contohnya, organisasi masyarakat sipil, Ushahidi, menggunakan media elektronik dan kerumunan orang sebagai sumber untuk memperingatkan mengenai potensi titik panas dan melaporkan insiden kekerasan. Komite penghubung partai politik dan mekanisme lainnya dapat bermanfaat sewaktu mengurangi kekerasan potensial dan eskalasinya. Transparansi, inklusivitas dan akuntabilitas saat mentabulasi hasil pemilu—termasuk tabulasi suara paralel oleh organisasi masyarakat sipil independen dan partai politik—dapat meningkatkan keyakinan pada hasil dan mengurangi volatilitas pascapemilu. Proses keluhan yang dipercepat dengan pemulihan yang efektif juga diperlukan, sehingga ada alternatif hukum untuk menggunakan kekerasan untuk menantang pemilu. Semua langkah-langkah ini menyelamatkan nyawa.

51. Untuk keamanan jangka panjang, tidak ada pengganti untuk mengakhiri impunitas yang kerap mengelilingi kekerasan pemilu. Hal ini, bagaimanapun, membutuhkan terpenuhinya tantangan ketaatan hukum yang dijelaskan sebelumnya, yang pada gilirannya membawa kami kembali ke politik. Para pemimpin nasional, politik petahana dan penantang pemilu, semuanya memiliki kewajiban untuk memasukkan lembaga demokrasi dengan *etos* demokrasi.

Bergabung pada Permainan Pemilu di El Salvador

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) adalah partai politik besar sayap kiri di El Salvador, dibentuk tahun 1992 menyusul perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang saudara negara tersebut. Selama 12 tahun sebelum itu, FMLN bertugas sebagai payung kelompok gerilyawan kiri yang memerangi pemerintah militer sayap kanan.

Salah satu fitur kunci perjanjian perdamaian tahun 1992 adalah membawa FMLN ke proses politik. Sebagai ganti demobilisasi grup pada kekuatannya, pemerintah 'setuju melaksanakan reformasi militer, keadilan, dan lembaga pemilu yang memungkinkan terjadinya persaingan politik'.²³ Namun sementara perjanjian transisi serupa telah gagal di sejumlah negara di seluruh dunia, sebagian besar El Salvador telah sangat berhasil bertransisi ke masyarakat yang persaingan pemilunya

diutamakan sebagai bentuk pokok dari manajemen konflik masyarakat. FMLN telah berpartisipasi pada setiap pemilu sejak 1992, memuncak saat kandidat FMLN, Mauricio Funes memenangkan kursi kepresidenan pertama kalinya tahun 2009.

Beragam faktor berkontribusi pada transisi penuh damai ini, namun sepanjang periode pascaperang, FMLN melihat keuntungan nyata dari partisipasi mereka di politik pemilu. Sebelumnya, partai memenangkan pertarungan menjabat walikota di beberapa kota besar utama dan menjadi partai terbesar kedua atau ketiga di badan legislatif sejak 1994. Pembagian kekuasaan dalam negara memungkinkan FMLN melindungi kepentingan mereka bahkan saat menghadapi kekalahan pemilu dan membantu mencegah kemunduran ke konflik yang diperbarui.

Tantangan “winner-take-all” politik

52. Bahkan jika sebagian besar pemilu itu sendiri berjalan penuh damai, mereka juga menghadapi tantangan dalam memberikan keamanan bersama dalam arti yang lebih luas. Di beberapa negara, persaingan pemilu adalah permainan “winner-take-all”/pemenang mendapatkan semuanya, memperoleh keuntungan yang meliputi banyak hal di bidang politik dan ekonomi, dan mereka yang kalah menghadapi ancaman hukuman bahkan kekerasan. Agar pemilu berintegritas, maka mereka harus menghindari dari situasi “winner-take-all”/pemenang yang mendapatkan segalanya dan sebaliknya, menciptakan sistem politik sehingga pihak yang kalah pun mendapatkan insentif untuk berpartisipasi.

53. Keyakinan bahwa seseorang akan bebas untuk mengelola dan menyanggah pemilu di masa mendatang didukung sejauh ada lembaga dan ketaatan hukum untuk melindungi pemilu berintegritas dan hak asasi manusia lainnya, yang telah kita bahas lebih dulu di bab sebelumnya. Lembaga lainnya, seperti legislator yang kompeten dan efektif, dapat memberikan pertanggungjawaban horisontal dan memeriksa kekuasaan eksekutif, oleh karena itu memastikan para penantang politik bahwa demokrasi dan dengan kecakapannya menantang untuk kekuasaan, akan berlanjut terus menerus.

54. Pada saat bersamaan, sejumlah poin bantahan—legislator, jabatan gubernur di daerah, jabatan walikota dan posisi kepemimpinan setempat—dikombinasikan dengan pelimpahan kekuasaan yang penting, terencana dan terlaksana dengan baik serta desentralisasi anggaran, dapat memitigasi karakter pemilu “semua-atau-tidak sama sekali”. Saat sistem pemilu sangat terpusat, para kandidat dan partai yang kalah pemilu merisikokan dengan menutup jalan mereka sepenuhnya dari kekuasaan politik dan alokasi barang publik.

55. Tantangan ini bisa menjadi sangat akut pada sistem mayoritas yang cenderung untuk menghasilkan pemerintahan partai tunggal yang stabil, berarti bahwa mereka yang kalah pemilu secara permanen merisikokan menutup jalan dari kekuasaan politik, terputus dari sumber daya dan rentan terhadap penipuan.²⁴

Tantangan Negara Pasca Konflik

56. Tantangan untuk menciptakan keamanan bersama melalui pemilu berintegritas sangat jelas dirasakan di negara-negara yang muncul akibat perang saudara. Pemilu di lingkungan pasca konflik menghadapi tantangan khusus. Terkadang, tujuan penghentian perang dan demokrasi berada dalam ketegangan. Pemilu di negara-negara pasca konflik berlangsung di lingkungan fisik dan sosial yang rapuh. Ketakutan, kebencian dan permusuhan mungkin marak; perusakan infrastruktur dan kapasitas dalam kondisi lemah, bahkan membuat pekerjaan administrasi yang paling biasa pun menjadi sulit; penyebaran senjata kecil dan ringan (dan para tentara usia muda yang menggunakannya) berarti kembali kekekerasan sangatlah dekat.

57. Pemilu dapat meningkatkan risiko kembali ke kekerasan dengan memperkuat persaingan dan perbedaan politik antar bekas faksi yang bertikai. Mobilisasi politik sepanjang garis konflik

terdahulu tak jarang lebih murah dan lebih mudah daripada memobilisasi sepanjang platform programatis, sehingga partai politik cenderung merefleksikan perpecahan yang sama yang dikaitkan dengan konflik.²⁵ Taktik kampanye memecah belah dapat juga mempertajam ketidakamanan yang sering dihadapi bekas faksi, dan menaikkan momok eksploitasi, segera setelah diasumsikan pihak yang menang mengambil alih kendali negara.

58. Pada konteks pasca konflik, bekas partai yang bertikai tunduk pada ketidakamanan sesungguhnya karena lembaga yang lemah dan norma demokrasi yang baru timbul mungkin tidak bisa mendesak penguasa untuk menolak demokrasi atau menyalahgunakan kekuasaan untuk menganiaya musuh-musuh politik.²⁶ Ancaman kekalahan langsung di jajak pendapat mungkin tidak bisa ditoleransi oleh kelompok bersenjata yang berjuang untuk menghindari kekalahan di medan perang, meningkatkan risiko kembalinya ke konflik.

59. Bagaimanapun, riset menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu, bekas partai yang bertikai memang menganut politik pemilu sebagai bentuk keamanan bersama. Ketika perjanjian damai termasuk program integrasi tentara, pemilu pasca konflik lebih mungkin terjadi dan kemungkinan besar akan berhasil.²⁷ Proses demobilisasi, pelucutan senjata dan reintegrasi, serta reformasi di bidang keamanan erat berkaitan dengan mencapai kedamaian yang lebih stabil. Sangat penting bahwa pilihan mengenai sistem pemilu dalam rangka memastikan bahwa terdapat banyak ruang bantahan, kendala pada aturan eksekutif dan pembagian kekuasaan—semua faktor yang mengurangi politik pemenang memperoleh semua/“winner-take-all” antitesis terhadap keamanan bersama.

Memperkuat Partisipasi Perempuan di India

Bukti terbaru dari India menganjurkan bahwa kuota dan pencadangan kursi dapat memberikan manfaat nyata bagi perempuan. Amendemen konstitusional tahun 1993 mencadangkan sepertiga posisi pemimpin dewan desa untuk perempuan, namun dewan desa tertentu yang dicadangkan dipilih secara acak untuk masing-masing pemilu. Studi oleh Rikhil Bhavnani melihat betapa posisi yang telah dicadangkan bagi perempuan di satu pemilu dapat mempengaruhi kinerja perempuan di pemilu selanjutnya, bahkan setelah kursi tersebut tidak lagi dicadangkan. Bhavnani menemukan bahwa perempuan memiliki kemungkinan lima kali lebih besar untuk memenangkan pemilu di desa-desa tersebut, menganjurkan bahwa sistem kuota dapat berhasil dalam memperkenalkan perempuan yang memenuhi syarat ke kancah politik dan mengajarkan partai politik bahwa perempuan mampu memenangkan pemilu untuk partai mereka.²⁸

Studi lainnya, oleh Raghavenra Chattopadhyay dan Esther Duflo, melihat betapa meningkatnya

partisipasi perempuan di pemerintahan mempengaruhi kualitas pemerintahan itu sendiri.²⁹ Di India, amandemen konstitusional tahun 1993 yang sama memberikan kendali lebih terhadap belanja pemerintah setempat pada dewan desa. Chattopadhyay dan Duflo menemukan bahwa dewan-dewan tersebut yang dipimpin oleh perempuan lebih cenderung berinvestasi pada proyek infrastruktur yang memprioritaskan perempuan, contohnya air minum dan jalan di Bengal Barat, serta program air minum dan kesejahteraan di Rajasthan. Hal ini menyarankan bahwa meningkatkan perwakilan bagi perempuan tidak hanya persoalan kesetaraan politik, namun juga memberikan manfaat pemerintahan yang nyata akan isu penting bagi perempuan.

Bersama-sama, studi ini membantu menunjukkan bahwa perangkat yang efektif untuk penguatan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan memang ada, dan perangkat tersebut dapat berjalan jauh menuju peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan perempuan.

Menghilangkan Hambatan Partisipasi

60. Keterlibatan semua pihak merupakan prinsip fundamental yang berada dibalik integritas pemilu, namun di seluruh dunia, halangan untuk memilih dan partisipasi memilih menjadi ancaman untuk menyepelkannya. Halangan-halangan ini muncul dalam beragam bentuk. Larangan hukum dapat menentukan siapa yang diperbolehkan memilih atau mencalonkan diri untuk dipilih, membatasi hak berpolitik

pada kelompok tertentu di dalam negeri. Halangan administratif dapat menghalangi pemilihan dengan mempersulit bagi kelompok masyarakat untuk berpartisipasi pada aspek proses pemilu yang berbeda. Serupa dengan hal itu, pembatasan ekonomi dapat menempatkan beban yang tidak semestinya pada beberapa bagian tertentu dari populasi, sementara tekanan sosial dapat menghalangi partisipasi oleh kelompok-kelompok yang secara tradisional tidak mengambil bagian dalam proses politik.

Menekan Partisipasi Afrika Amerika di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat (AS), warga Afrika-Amerika menghadapi sejumlah rintangan hukum dan administratif yang membuatnya lebih sulit bagi mereka untuk memberikan suaranya. Sementara tak ada pelarangan yang secara eksplisit menasar pada kelompok tertentu, namun cenderung untuk secara tidak sepadan mempengaruhi warga miskin dan minoritas, membuatnya lebih sulit bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Batasan pada pendaftaran pemilih merupakan halangan utama pemungutan suara bagi warga Afrika-Amerika di negaranya. Negara bagian seperti Florida dan Texas telah membuat peraturan yang membuatnya lebih berat untuk mendorong menyelenggarakan pendaftaran pemilih, sementara yang lainnya telah menaikkan persyaratan pendaftaran pemilih, misalnya memerlukan akte kelahiran atau masa tinggal lebih lama. Beberapa negara membersihkan berkas pemilih mereka, sering kali secara tidak pantas, mendiskualifikasi ribuan orang yang memenuhi syarat. Dan 5 juta rakyat Amerika telah dicabut hak pilihnya karena mereka telah terbukti bersalah melakukan kejahatan.³⁰ Semua batasan ini secara tidak seimbang mempengaruhi warga Afrika-Amerika dan kelompok minoritas lainnya.³¹

Warga Afrika-Amerika juga menghadapi rintangan administratif yang membuatnya lebih sulit untuk memberikan suara mereka setelah mereka terdaftar. Sejak 2011, sembilan negara bagian telah memberlakukan persyaratan identifikasi pemilih yang membuatnya lebih sulit bagi minoritas untuk memilih.³² Beberapa negara bagian secara signifikan mengurangi kesempatan untuk pemberian suara lebih dini dan rakyat yang absen, metode yang bisa sangat menguntungkan kelompok minoritas yang umumnya tidak begitu mampu pergi ke TPS secara langsung pada hari pemungutan. Mereka yang tidak bisa pergi ke TPS umumnya menghadapi waktu tunggu yang lebih lama dari warga kulit putih. Tahun 2008, 15 persen kaum Afrika-Amerika dan 8 persen kaum Latin harus menunggu lebih dari satu jam untuk memilih, dibandingkan 5 persen warga kulit putih, menaruh beban tidak sepadan pada pemilih minoritas.³³

Pendaftaran pemilih yang lebih ketat dan persyaratan identifikasi telah diletakkan pada tempatnya seolah-olah untuk memerangi pemalsuan pemilih. Tetapi insiden pemalsuan pemilih di AS hanya menghilang sedikit,³⁴ yang artinya bahwa konsekuensi utama dari peraturan ini adalah meningkatnya kasus tercabutnya hak pilih warga Afrika-Amerika dan kelompok minoritas lainnya.

61. Di berbagai negara, perempuan, minoritas, rakyat terlantar dan penyandang cacat yang menghadapi

semua rintangan untuk berpartisipasi yang secara signifikan mengurangi perwakilan dan pengaruh politik mereka.

Partisipasi Perempuan

62. Banyak rintangan bagi perempuan untuk berpartisipasi politik yang telah dihilangkan sepanjang satu abad terakhir ini, dan hak pilih universal kini menjadi norma global. Namun di banyak negara, perempuan menghadapi tantangan yang berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.³⁵ Termasuk di dalamnya rintangan politik seperti kurangnya dukungan dari partai politik dan organisasi lainnya, dan terbatasnya pelatihan bagi perempuan dalam partisipasi masyarakat dan politik. Perempuan juga menghadapi rintangan sosial dan ekonomi, termasuk tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tingginya angka buta huruf, kurangnya akses ke pendidikan, dan kekerasan serta intimidasi. Budaya dan keyakinan beragama mengenai peran yang layak bagi perempuan di masyarakat dapat juga menjadi hambatan utama.

63. Perempuan masih menyusun kurang dari 20 persen legislator seluruh dunia, bahkan di negara-negara berkembang, mereka hanya terhitung sebesar 27 persen dari perwakilan.³⁶ Jumlah posisi tingkat kabinet sama mengecewakannya dan pekerjaan signifikan masih harus dilakukan di seluruh dunia dalam hal memperlebar peranan perempuan di lembaga politik lainnya seperti pengadilan dan komisi pemilu. Karena keanggotaan di lembaga ini paling sering melalui penunjukan politis, para pemimpin politik menggunakan kekuatan hebatnya untuk mencapai atau menghalangi kesetaraan gender di ranah ini.

64. Beberapa negara telah mengadopsi mekanisme formal untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peluang yang sama untuk memainkan peran sentral dalam politik. Saat ini, 50 negara memiliki kuota wajib bagi keikutsertaan perempuan

dalam politik, walaupun berbeda dalam keefektifan dan penegakkannya. Kuota dapat membantu mengembalikan penyimpangan sejarah yang membatasi perwakilan perempuan dengan menciptakan tingkatan arena permainan yang lebih banyak. Di setiap kawasan di dunia, persentase rata-rata perempuan menjabat sebagai legislator nasional lebih tinggi dari negara-negara yang memiliki kuota wajib di tingkat nasional.³⁷

65. Agar kuota benar-benar memiliki dampak demokratisasi, maka harus dikaitkan bukan hanya dengan kuantitas perempuan yang menjabat, tetapi juga kualitas posisi yang tersedia untuk mereka. Setelah mereka menjabat, penting bagi pejabat perempuan untuk memiliki kesempatan yang setara untuk menjalankan kekuasaan dan wewenangnya.

66. Beberapa berargumen bahwa penggunaan kuota bertentangan dengan kesetaraan politik individu dan persyaratan bahwa semua orang bisa diperlakukan sama. Sudah pasti tekanan muncul ketika pemerintah memperlakukan individu secara berbeda dalam rangka mendukung kesetaraan kelompok yang secara historis telah dikeluarkan dari partisipasi politik. Bagaimanapun, ketika kelompok menghadapi kerugian historis, sosial dan ekonomi, 'mereka tidak diperlakukan sama ketika mereka memperlakukan hal yang serupa'.³⁸ Untuk menyelesaikan konflik ini, kami percaya bahwa kuota harus digunakan secara bijaksana, dengan *sunset clause* untuk penghapusannya. Hasil kerja cendekia baru-baru ini mendukung pendekatan seperti itu dan mengindikasikan bahwa kuota memiliki dampak yang tahan lama pada perwakilan perempuan, bahkan ketika mereka diberhentikan.³⁹

Partisipasi Kelompok Minoritas

67. Seperti halnya perempuan, kaum minoritas menghadapi rintangan formal dan informal atas partisipasi politik, bahkan dalam hal mengkonsolidasikan demokrasi dengan hak pilih universal sebagai normanya. Karena dengan perempuan, penghapusan semua rintangan kelembagaan untuk berpartisipasi mungkin tidak cukup menghasilkan kesetaraan perwakilan.⁴⁰ Kurangnya sumber keuangan dan rendahnya tingkat pendidikan di antara minoritas yang termarginalkan menimbulkan hambatan yang signifikan untuk berpartisipasi, baik dalam hal pemilihan suara dan perwakilan di kancah politik.⁴¹ Dalam demokrasi yang lebih berkembang, umumnya minoritas menghadapi lebih banyak rintangan administratif untuk berpartisipasi. Semua negara dengan populasi minoritas yang menghadapi rintangan untuk partisipasi yang setara harus mengidentifikasi dan menghapuskan rintangan seperti itu.

Partisipasi Pengungsi dan Rakyat Terlantar Internal

68. Partisipasi para pengungsi dan rakyat terlantar internal (IDP) pada pemilu pasca konflik menimbulkan tantangan politik dan administratif serius. Namun pemberian hak pilih rakyat terlantar itu penting untuk memastikan integritas pemilu dan pembentukan demokrasi. Gagal untuk memberikan hak pilih pada rakyat terlantar dapat menciptakan sekelompok penduduk yang tidak puas, yang bertentangan dengan proses damai dan membatasi legitimasi yang diakui dari proses pemilu. Memastikan bahwa kelompok rakyat terlantar dapat memilih menghadirkan tantangan utama. Namun, tantangan ini dapat diatasi melalui reformasi legislatif, membuat peka EMB menambah langkah khusus pada proses pendaftaran pemilih, membuat pengaturan TPS yang sesuai, dan menyediakan lingkungan yang aman agar rakyat terlantar bisa memberikan suara merek.

Memerangi Keuangan Terlarang di Kosta Rika

Keuangan terlarang telah menemukan jalannya masuk ke kancah politik di negara-negara di seluruh Amerika Latin dan Kosta Rika, terlepas dari kinerja mereka sebagai negara dengan demokrasi yang kuat dan pemerintahan yang baik, tidak ada pengecualian. Pada akhir 1980 dan awal 1990an, investigasi perdagangan narkoba menemukan bahwa kedua partai utama di negara tersebut telah menerima kontribusi dari sumber-sumber yang mencurigakan, termasuk Jenderal Manuel Noriega dari Panama dan sejumlah individu lainnya yang belakangan dikaitkan dengan penyelundupan narkoba dan aktivitas terlarang lainnya.⁴² Reaksi di Kosta Rika adalah untuk memberlakukan larangan ke semua

kontribusi asing untuk kampanye politik. Peraturan baru tersebut, diberlakukan tahun 1996, tidak cukup untuk membersihkan politik Kosta Rika dari uang korupsi, karena sejumlah skandal sejak saat itu dapat dibuktikan. Namun skandal 1980an memang mendapatkan pemeriksaan yang ketat atas peran uang terlarang di negara tersebut, menyusun langkah untuk reformasi tambahan dan peningkatan bertahap dalam transparansi. Pada tahun belakangan ini, lembaga pemilu telah diberikan wewenang penegakan yang lebih tegas dan persyaratan pelaporan, yang nantinya akan bergerak lebih jauh dalam menghapus pembiayaan politik yang korup dari Kosta Rika.

Hambatan bagi Pemilih dengan Disabilitas

69. Sekitar 15 persen dari populasi dunia hidup dengan kekurangan mental atau fisik.⁴³ Golongan warga negara ini kerap menemui kendala unik dalam berpartisipasi di proses pemilu, mulai dari kesulitan secara fisik mengakses TPS hingga diskriminasi langsung dan penelantaran. Tahun 2002, aktivis hak penyandang cacat, pejabat pemilu dan parlementer internasional dari lebih 24 negara menyusun Rancangan Hak Pemilu bagi Warga Penyandang cacat.⁴⁴ Banyak negara telah membuat perkembangan signifikan dalam mengedepankan hak-hak ini, namun masih banyak hal yang harus dilakukan.

70. Sierra Leone memberikan contoh khusus yang mengejutkan dari sebuah negara yang telah berupaya untuk menghilangkan rintangan pemilu bagi para penyandang cacat. Perang saudara bertahun-tahun telah menghasilkan populasi penyandang cacat yang besar, termasuk melalui kampanye oleh pemberontak Front Revolusioner Bersatu.⁴⁵ Pada pemilu yang lebih baru, sejumlah upaya telah dilakukan termasuk untuk menyertakan para penyandang cacat dalam proses pemilu dan politik. Hal ini menyoroti beberapa langkah yang sederhana namun efektif yang dapat diambil, sebagai contoh menghindari TPS yang memiliki tangga atau memperbolehkan pemilih yang cacat untuk tidak perlu mengantri, karena sering kali memakan waktu berjam-jam lamanya.⁴⁶ Tanpa upaya lebih banyak seperti ini, para penyandang cacat di negara-negara seluruh dunia akan terus menghadapi kesulitan besar untuk menjadi bagian dari proses pemilu.

Kuangan Politik

71. Untuk semua demokrasi, kaya dan miskin, lama dan baru, keuangan politik yang diatur secara buruk merupakan ancaman

besar bagi pemilu berintegritas. Partai politik dan para kandidat harus memiliki akses ke keuangan untuk mengelola dan berkampanye, namun keuangan politik selalu memiliki potensi untuk merusak integritas pemilu dan pemerintahan demokratis. Daftar tidak lengkap mengenai demokrasi yang telah menderita skandal kampanye keuangan selama 20 tahun termasuk negara Argentina, Brazil, Kanada, Kolombia, Perancis, Jerman, Jepang, Afrika Selatan, Inggris dan AS.

72. Keuangan politik meliputi keuangan kampanye, keuangan partai dan semua aspek yang berkaitan dengan pendanaan serta pembelanjaan oleh partai dan para kandidat pada kampanye pemilu. Keuangan politik yang diatur secara buruk dapat merusak integritas pemilu baik cara yang jelas maupun tersembunyi. Pembelian suara dan penyuapan para kandidat sebagai imbalan bantuan politik secara jelas mengorupsi integritas pemilu. Namun keuangan politik yang diatur secara buruk dapat merusak integritas pemilu dengan cara yang lebih halus. Di era ledakan pertumbuhan dalam pembelanjaan kampanye di demokrasi yang lebih lama, warga negara kehilangan keyakinan pada proses pemilu. Mereka menduga bahwa golongan yang lebih sejahtera dan perusahaan berpengaruh lebih besar di urusan publik, dan terutama di media, terutama dalam hal membeli waktu dan tempat untuk iklan politik. Mereka mengerti bahwa keuangan kampanye yang dikelola secara buruk menghilangkan kesetaraan politik. Dan mereka takut bahwa keuangan seperti itu mengorupsi lembaga perwakilan mereka. Ketika kontribusi kampanye yang besar terkait dengan lobi yang ekstensif para politisi terpilih, warga negara biasa menyadari adanya konflik kepentingan. Pada gilirannya, keuangan kampanye yang diatur secara buruk mengarah pada kurangnya partisipasi dalam proses demokrasi, mencemari integritas pemilu dan melemahkan demokrasi.

73. Kelompok antitesis terhadap demokrasi, seperti kejahatan terorganisir, menemukan keuangan kampanye merupakan jalan paling tepat untuk pengaruh politik menulis tentang perilaku ganas dari kartel narkoba dalam politik demokratis di Amerika Latin, seorang pakar mengamati:

Berinvestasi pada politik merupakan langkah wajar bagi satu industri yang membutuhkan penegakan hukum yang lemah dan langkah pengendalian atas lembaga publik yang penting seperti bea cukai, untuk berkembang. Membantu

memilih teman yang dapat membuka pintu dan menjajakan pengaruh di seluruh aparat negara sering kali lebih efisien daripada metode lainnya, seperti menyuap, memeras atau mengancam dengan kekerasan.⁴⁷

74. Para pakar tentang kejahatan terorganisir transnasional dan pembiayaan teroris mengamati bahwa di Afrika Barat, ‘pemilu demokratis, ketiadaan transparansi keuangan pemilu yang efektif dan kelalaian, memberikan peluang bagi kejahatan terorganisir untuk memperoleh pengaruh dari para pemimpin dengan membiayai kampanye mereka’.⁴⁸

Duta Pendekatan terhadap Pertimbangan Kemerdekaan Berbicara dan Kampanye Pembaruan Keuangan: AS dan Kanada

Pada tahun-tahun belakangan ini, beberapa keputusan pengadilan telah memusnahkan reformasi keuangan politik di AS. Jantung keputusan tersebut adalah desakan Mahkamah Agung AS bahwa donasi kampanye merupakan kemerdekaan berbicara yang dilindungi oleh Amandemen Pertama dari Konstitusi AS. Penalaran seperti ini berada di balik keputusan Pengadilan 2010 dalam kasus *Citizens United vs. Federal Election Commission*, yang membatalkan Undang-Undang Reformasi Kampanye Bipartisan Kongres dan secara efektif menghapus semua rintangan untuk bekerja sama dan pengeluaran serikat untuk mempengaruhi federal, negara bagian dan pemilu setempat.

Peraturan lain oleh Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit, *SpeechNow vs. Komisi Pemilu Federal*, memperbolehkan individu untuk menghindari kontribusi kampanye melalui yang disebut

Super PACs. Secara hukum, *Super PACs* seperti itu harus merahasiakan kontributor mereka dan mungkin tidak berkoordinasi secara langsung dengan para kandidat. Praktiknya, kedua batasan telah dilanggar. Pendonor individu yang kaya telah mendonasikan puluhan milyar dolar melalui organisasi boneka (*shell organization*) yang dibentuk untuk menyembunyikan sumber uang mereka. Banyak pakar meyakini bahwa masing-masing sisi di pemilu presidensial 2012 yang akan datang akan menggalang dana lebih dari 1 triliun dolar. Menulis untuk mayoritas kasus *Citizens United*, Hakim Anthony Kennedy menulis bahwa ‘belanja independen, termasuk yang dilakukan perusahaan, tidak menimbulkan korupsi atau munculnya korupsi’. Warga Amerika tidak setuju.

Jajak pendapat nasional tahun ini oleh Pusat Brennan bagi Keadilan di New York University Law School

menunjukkan bahwa ‘hampir 70 persen rakyat Amerika percaya belanja Super PAC akan mengarah pada korupsi dan bahwa tiga dari empat orang Amerika percaya dengan membatasi donasi dari perusahaan, serikat dan individu ke Super PAC akan membatasi korupsi’.⁴⁹ Lebih dari tiga perempat responden setuju ‘bahwa anggota Kongres lebih cenderung bertindak pada kepentingan satu kelompok yang menghabiskan jutaan dolar untuk memilih mereka dari pada bertindak demi kepentingan publik’.⁵⁰

Hampir dua pertiga warga Amerika yang mengatakan bahwa mereka kurang memercayai pemerintah karena pendonor besar memiliki pengaruh lebih besar terhadap pejabat terpilih daripada rata-rata orang Amerika.⁵¹

Putusan *Citizens United* telah merusak kesetaraan politik, melemahkan transparansi proses pemilu dan menggoyang keyakinan warga negara pada lembaga politik Amerika dan pemilu.

Kanada telah menghadapi banyak tantangan keuangan kampanye yang sama yang AS telah perjuangkan selama satu dekade terakhir. Kebalikan dengan AS, Kanada telah berhasil mencapai keseimbangan antara mempertahankan hak berbicara individu dan melindungi keseluruhan integritas proses pemilu.

Seperti halnya AS, Kanada di awal tahun 2000an memberlakukan larangan terhadap kesanggupan organisasi pihak ketiga seperti perusahaan dan serikat pekerja untuk mengeluarkan uang secara langsung pada kampanye politik. Mengenai keputusan tahun 2004 tentang penegakan larangan ini, Mahkamah Agung Kanada berargumen bahwa pemerintah memiliki hak untuk melarang beberapa pidato politik dalam rangka mengembangkan prinsip lainnya seperti kesetaraan dalam proses politik. Pengadilan Kanada secara konsisten telah mengisyaratkan bahwa memiliki kekayaan lebih banyak tidak memberikan individu atau perusahaan, suara yang lebih besar di politik.⁵²

Mencari Praktik Terbaik

75. Keuangan politik tidak mendapatkan perhatian dan komitmen untuk reformasi yang layak. Di dunia dengan ketidaksetaraan meningkatnya ekonomi, konsentrasi yang lebih besar dari kesejahteraan dalam demokrasi, dan resesi ekonomi global, keuangan politik merupakan tantangan yang hanya akan tumbuh jika terlihat signifikan.

76. Membatasi dampak kejam dari keuangan politik atas integritas politik itu sulit dan rumit. Sulit membujuk politisi

yang mendapat keuntungan dari keuangan politik yang diatur secara longgar untuk membatasinya. Transparansi rezim sulit dimonitor dan ditegakkan, bahkan ketika sukses, mereka tidak ikut dan diri mereka tidak menghentikan kontribusi atau belanja yang berlebihan. Seperti catatan seorang cendekia, transparansi sukses rezim menangani kampanye keuangan seperti kamera web yang memberikan bukti visual dengan waktu nyata dari tumpahan minyak besar-besaran: intinya bukan melihatnya, namun ‘menghentikan endapannya’.⁵³

77. Tidak ada konsensus mengenai praktik terbaik keuangan politik. Pada kewajiban internasional di Pasal 7 (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, yang menyerukan pada negara-negara untuk meningkatkan transparansi di kehidupan berpolitik sementara, memperhitungkan hukum nasional. Rekomendasi lebih detil dan komprehensif dapat ditemui di organisasi regional. Dewan Eropa, Organisasi Negara Bagian Amerika (OAS) dan Uni Afrika (AU), sebagai contoh, semuanya mendesak anggota mereka untuk mengadopsi pedoman untuk keuangan politik pada perundangan nasional mereka. Keuangan politik secara rumit terikat pada nilai-nilai politik dan budaya suatu negara. Dengan adanya peraturan keuangan politik yang tergantung pada hukum setempat, politik dan kondisi budaya, tidak diinginkan untuk membuat satu norma global saat menangani keuangan politik. Sebagai tambahan, reformasi keuangan politik seharusnya didekati sebagai latihan yang sedang berlangsung dengan satu orang mengatur untuk jangka panjang namun satu lagi merevisi untuk jangka pendek, agar beradaptasi terhadap kondisi perubahan. Sekali lagi, peraturan hukum tampak jelas kurang menentukan. Penegakan dan pelaksanaan hukum keuangan politik sulit; jika tidak dilaksanakan secara ketidakterbukaan, mereka dapat membuat asimetri yang hebat dalam persaingan politik.

78. Bagaimanapun, praktik yang baik dapat diidentifikasi untuk membentuk standar minimum integritas bagi pemilu, membutuhkan transparansi yang luas, peraturan donasi dan belanja, serta penalti bagi penyalahgunaannya.

Transparansi

79. Pengawasan yang efektif dari peran uang dalam politik memerlukan transparansi dan pelaporan keuangan politik. Transparansi

perlu dalam memerangi korupsi, dan membantu para pemilih dalam membuat informasi pilihan mengenai kandidat dan kebijakan. Ketiadaan persyaratan pelaporan, batas donasi atau belanja yang tidak masuk akal karena tidak ada cara untuk mengetahui jika mereka ditaati atau tidak. Minimal, laporan keuangan politik harus:

80. *Komprehensif* dan mengidentifikasi pemasukan, pengeluaran, hutang dan aset. Total keseluruhan dan sifat semua kontribusi (jenis atau finansial) harus dispesifikasi dan pendonor harus diidentifikasi.

81. *Tepat waktu*. Laporan harus berjalan secara terus menerus melalui siklus pemilu, namun jika tujuannya untuk menginformasikan para pemilih mengenai pembiayaan kampanye, maka laporannya harus tersedia dengan baik jauh sebelum hari pemilihan.

82. Dengan *mudah tersedia untuk publik*.

83. Dikenakan *sanksi ketat* bagi pelaporan yang tidak memadai atau tidak tepat waktu.

Larangan dan Pembatasan Kontribusi Pribadis

84. Kebanyakan negara percaya bahwa partai dan kandidat harus dibiayai, paling tidak sebagian, melalui kontribusi pribadi sebagai manifestasi dari dukungan minimal dari para pemilih. Namun, dengan donasi pribadi yang tidak diatur, timbul kemungkinan dari beberapa pendonor membeli pengaruh pada proses pemilu. Oleh sebab itu, praktik terbaik lainnya adalah kontrol yang wajar untuk donasi pribadi dengan menempatkan batasan jumlah di besaran donasi serta melalui pelarangan donasi tak dikenal, donasi asing atau donasi kriminal.

85. Di beberapa negara, menghabiskan dana pada kampanye disamakan dengan melaksanakan kebebasan berpendapat. Namun, negara harus berhak dalam membatasi hak tersebut pada hal-hal tertentu bagi barang umum, seperti melawan korupsi atau melestarikan kesetaraan politik.

Saldo pribadi dan pendanaan publik

86. Sebagai pelengkap bagi kontribusi pribadi bahwa partai politik dan kandidatnya membesarkan mereka, negara dapat menyamakan kancah permainan kontestan pemilu dengan memberikan dukungan keuangan publik. Dukungan publik bisa dalam bentuk non-moneter, termasuk bebas akses ke airtime media atau penggunaan fasilitas publik untuk kampanye dengan gratis. Memang, sedikit negara yang menggunakan pendanaan umum untuk mendukung kesetaraan gender. Ketika Kroasia mengadopsi Undang-Undang Partai Politik baru tahun 1993, dinyatakan bahwa tambahan pendanaan publik diberikan untuk partai politik yang memiliki seorang perempuan sebagai kandidat terpilih mereka.⁵⁴

Melarang Penyalahgunaan Sumber Negara

87. Penyalahgunaan sumber negara antara dan selama kampanye pemilu menjadi masalah di banyak negara di dunia. Mayoritas negara-negara di dunia memiliki semacam bentuk dasar peraturan melawan kandidat dan partai petahana menggunakan sumber daya negara untuk keuntungan pribadi.⁵⁵ Namun, mengingat praktik penyalahgunaan keuangan publik masih banyak dilakukan, konsep lebih luas mengenai apa yang

membenarkan penyalahgunaan tersebut perlu diterapkan bersama dengan penegakan hukum yang tegas.

Mengontrol belanja kampanye

88. Banyak negara yang mengatur batas atas pembelanjaan kampanye untuk menghindari eskalasi biaya kampanye yang menguntungkan dengan sumber daya yang lebih besar. Batas maksimal pengeluaran ditentukan berkaitan dengan faktor seperti jumlah penduduk yang memilih atau pemilih yang berlaku, daripada menyusun satu batas maksimal. Jika tujuannya untuk merancang kerangka kerja yang komprehensif, batas pengeluaran harus memasukkan belanja pihak ketiga dan pengeluaran seperti gaji pegawai dan jajak pendapat. Batasan pada pengeluaran kampanye harus dengan tegas melarang pembelian suara.

Pemantauan Independen dan Kewenangan Pengawasan

89. Sistem dengan persyaratan transparansi yang kuat akan menjadi tidak efektif jika tidak ada lembaga independen yang bertanggung untuk menerima, memeriksa dan mengaudit laporan keuangan dari partai politik dan para kandidat. Lembaga seperti itu harus memiliki kekuatan bukan hanya untuk memantau rekening partai dan menyelidiki potensi pelanggaran keuangan politik namun juga untuk menjatuhkan sanksi keras jika terjadi ketidakpatuhan pada hukum. Sekarang ini sekitar 40 negara-negara yang kurang peraturan dan mewajibkan badan lainnya untuk memeriksa laporan keuangan atau menyelidiki pelanggaran keuangan politik.⁵⁶ Hal ini mewakili kelemahan vital dari segala proses yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan peranan uang yang dikendalikan dalam politik.

Masalah Khusus terkait Jaringan Kriminal dan Keuangan Politik

90. Sementara, peraturan keuangan umum di tingkat nasional merupakan instrumen penting untuk memerangi kejahatan terorganisir yang menggunakan politik keuangan sebagai media untuk perlindungan dan pengaruh, itu tidaklah cukup. Penyusupan kejahatan terorganisir transnasional ke dalam politik utama, dan kemampuannya untuk menggerakkan finansial melewati batas secara terlarang, membutuhkan upaya regional dan internasional untuk mengekangnya. Namun, tak ada pendekatan internasional yang sesuai untuk menyampaikan tantangan penyusupan jaringan kriminal internasional pada proses politik demokrasi. Ada kerjasama internasional pada beberapa badan penegak hukum, namun tidak pada pemerintah dan organisasi internasional—tidak sedikit pada organisasi regional—perlu menyampaikan isu tersebut sebagai tantangan fundamental untuk demokrasi. Kepemimpinan politik diperlukan untuk membawa tantangan ini ke tingkat lebih tinggi pada pertimbangan kebijakan internasional.

“ Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memastikan ketidakberpihakan politik dan fungsi efektif dari seluruh jajaran lembaga negara, termasuk badan keselamatan dan keamanan publik, penuntut umum dan pengadilan, begitu pula EMB yang kompeten, untuk menjamin pemilu berintegritas. ”

Bab 3:

Aksi Nasional untuk Pemilu Berintegritas

91. Tantangan yang dijelaskan pada bab sebelumnya membutuhkan aksi nasional oleh pemerintah, pejabat terpilih, partai politik, masyarakat sipil dan warga negara.

92. Agar pemilu dapat menyelesaikan secara damai dan kredibel dari persaingan menuju kursi pemerintahan dan memberikan kendaraan yang sesungguhnya bagi rakyat untuk menyatakan keinginan mereka dengan maksud siapa yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk memerintah, maka pemerintah harus memastikan perlindungan yang sama di bawah hukum mengenai hak-hak yang berhubungan dengan pemilu, serta pemulihan efektif ketika dilanggar. Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memastikan ketidakterpilih politik dan fungsi efektif dari seluruh jajaran lembaga negara, termasuk badan keselamatan dan keamanan publik, penuntut umum dan pengadilan, begitu pula EMB yang kompeten, untuk menjamin pemilu berintegritas.

93. Usaha untuk melindungi dan mengangkat integritas dari pemilu harus merupakan suatu komitmen berkelanjutan. Kerangka hukum harus ditinjau untuk memastikan bahwa: ada kesempatan hakiki bagi kontestan politik untuk bersaing secara jujur; pemulihan yang efektif dapat diterapkan oleh badan administratif dan pengadilan; pesaing politik dapat beralih ke hukum ganti rugi daripada kekerasan atau tindakan hukum ekstra lainnya; dan warga negara memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengatasi hambatan terhadap pemberian hak pilih politik mereka. Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil dapat memantau dan melaporkan fungsi lembaga negara.

94. Dalam rangka membangun demokrasi sebagai sistem keamanan bersama, reformasi pemilu harus dipahami secara luas dan mencakup rancangan kelembagaan dengan pandangan terhadap terhambatnya kekuasaan eksekutif, memberdayakan

legislator dan desentralisasi pemerintahan serta anggaran. Media dan masyarakat sipil dapat memainkan peranan kunci dalam hal memeriksa kekuatan sewenang-wenang dan menuntut pertanggungjawaban serta transparansi di pemerintahan.

95. Kekerasan berkaitan dengan pemilu membutuhkan berbagai tindakan tandingan yang berfokus pada beragam tujuan dari pelaku kejahatan, merusak pencapaian tujuan ini dan meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan tersebut. Mobilisasi populer melalui kampanye anti kekerasan berbasis komunitas, pengembangan pemantauan kekerasan sistematis dan jaringan peringatan dini, serta penggunaan laporan warga negara melalui hotline dan situs web, dikombinasikan dengan informasi yang telah diverifikasi dari para pengamat yang terlatih, dapat membantu menghalangi kekerasan dan membatasi dampaknya. Karakterisasi akurat dari integritas (atau ketiadaannya) dari beragam proses pemilu, termasuk akurasi tabulasi suara resmi, dapat menghapus dasar tuduhan tak beralasan, membangun keyakinan publik, meningkatkan peluang untuk menemukan penyelesaian atas masalah dan mitigasi potensi kekerasan skala besar yang tak jarang mengikuti pemilu. Pelatihan pejabat pemilu dan pejabat keselamatan publik dapat membantu mematahkan kekebalan hukum dan menghalangi tindakan politis yang bias sebagaimana tidak proporsionalnya penggunaan kekuatan.

96. Partisipasi penuh dari warga negara pada pemerintahan dan urusan umum merupakan dasar bagi pemerintahan demokratis dan memerlukan pendekatan aktif untuk menghilangkan rintangan terhadap partisipasi perempuan, kaum muda, minoritas, para penyandang cacat dan kelompok marjinal tradisional lainnya. Pemerintah harus mengambil langkah afirmatif, seperti kuota, untuk mengatasi warisan pencabutan hak pilih bagi perempuan dan lainnya, meninjau undang-undang dan prosedur untuk

menghapus rintangan terhadap partisipasi penuh, dan berinvestasi pada pendidikan dan kampanye lain untuk mendorongnya. Partai politik harus mengambil langkah afirmatif, termasuk kuota dan cara lainnya, untuk menggalakkan kepemimpinan dan partisipasi luas wanita dan lainnya yang secara tradisional kurang diwakili sebagai pemimpin partai dan para kandidat. Organisasi masyarakat sipil harus secara aktif menggalakkan partisipasi penuh dari seluruh warga negara, menyerukan pada pemerintah dan partai politik untuk melakukannya, juga memantau dan melaporkan atas kemajuan yang dibuat.

97. Dalam rangka melindungi integritas pemilu dan membatasi pengaruh jahat uang terhadap pemerintahan demokratis, peraturan keuangan politik dan keyakinan publik pada peraturan itu, sangatlah penting. Walaupun tidak ada formula yang menyampaikan ancaman dari keuangan politik yang longgar, praktik yang baik membutuhkan pelaporan yang kuat dan transparansi donasi serta pembelanjaan, kontrol yang cukup atas donasi individu dan perusahaan, kontrol pengeluaran yang bijaksana, pembiayaan umum yang rasional, serta sanksi ketat dan penalti bagi yang tidak mematuhi.

98. Tindakan-tindakan ini dapat dilakukan dari atas ke bawah oleh pemerintah dan para politisi yang berusaha memasukkan politik dan lembaga dengan etos demokrasi, dan dari bawah ke atas oleh warga negara dan organisasi masyarakat sipil yang berusaha menekan pemerintah untuk pemilu berintegritas.⁵⁷ Idealnya, pendekatan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas bekerja bersama, karena para pembaru atas ke bawah didukung oleh mobilisator dan kinerja pemerintah yang dipantau oleh organisasi rakyat. Akhirnya, pembaru atas ke bawah dan bawah ke atas dapat memperkuat upaya

mereka dengan menghubungkan dengan pemerintah demokratis yang sepeham dan organisasi masyarakat sipil di negara lain.

Upaya Dari Atas ke Bawah

99. Pejabat pemilu dapat menerapkan kebijakan yang menggalakkan dan melindungi pemilu berintegritas, dan menggunakan kekuasaan jabatan mereka untuk memastikan kebijakan tersebut diadopsi dan dipraktikkan. Reformasi pemilu, bagaimanapun, sangat jarang yang sederhana, jika saja untuk alasan mendasar, petahana yang telah dipilih menggunakan peraturan dan praktik yang menguntungkan mereka dan partainya umumnya memiliki kepentingan kuat dalam mempertahankan peraturan dan praktiknya. Namun, ada contoh kuat mengenai politisi yang memaksa meningkatkan integritas pemilu, walau peningkatan tersebut bukan merupakan kepentingan jangka pendek mereka. Para pemimpin seperti itu merupakan 'prinsipal yang berprinsip', yang dengan tindakan mereka menunjukkan komitmen terhadap demokrasi, peraturan hukum dan publik yang baik.⁵⁸ 'Prinsipal yang berprinsip' tersebut bisa memiliki pengaruh formatif pada perilaku umum terhadap integritas pemilu dan peraturan hukum yang mendukung pemilu tersebut.

100. Bahkan 'prinsipal yang berprinsip' pun berada di bawah tekanan yang besar untuk mengingkari komitmen mereka, ketika peraturan merugikan mereka dan pendukungnya. Bahkan jika mereka mempertahankan komitmen mereka di bawah tekanan, mereka harus mengkhawatirkan apakah reformasi yang diberlakukan mereka akan bertahan jika mereka selesai dari jabatannya. Oleh karena itu, komitmen dari atas ke bawah selalu diperkuat, ketika politisi dapat diikat pada janji mereka.

Upaya Dari Bawah ke Atas

101. Kekuatan terpenting dari pemilu berintegritas adalah tekanan dari warga negara. Ketika warga negara menuntut pemilu yang berintegritas, pejabat terpilih dan partai politik memiliki insentif untuk mengejar pembaruan pemilu.

102. Kelompok masyarakat telah berperan di banyak negara dalam pendidikan bagi para pemilih dan memotivasi warga negara untuk memilih, begitu pula memantau kinerja politisi dan parlemen dalam menjalankan janji mereka dan menyampaikan kepedulian warga negara mengenai peningkatan pemilu berintegritas. Kelompok non-partisan warga negara telah berhasil memantau pemilu di lebih dari 90 negara dan membuat kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas pemilu. Peran garis depan kelompok rakyat semakin meningkat dalam mengadvokasi reformasi undang-undang pemilu, memantau kekerasan pemilu, dan mengedukasi warga negara mengenai pemilu.

103. Berdampingan dengan pengembangan pemantau pemilu non-partisan, upaya dari bawah ke atas membutuhkan pengembangan profesional, media independen. Tentunya, satu studi penting dari malpraktik pemilu menunjukkan bahwa media independen sebagai faktor tunggal terpenting yang membedakan antar negara dengan pemilu berintegritas dari negara yang kurang integritas.⁵⁹

104. Para pemilih harus diinformasikan secara memadai agar membuat pilihan pemilu yang murni dan hal tersebut membutuhkan informasi yang memadai dan akurat dari berbagai sumber. Kepemilikan dan suara media yang plural, sebagaimana kewajiban yang dikendalikan negara dan media publik untuk menyediakan akses ke kontestan politik dan agar tetap bebas dari bias politik, merupakan hal pokok bagi pemilih dalam membuat pilihan yang

berbobot. Media komunikasi baru, menggunakan Internet dan teknologi komunikasi bergerak, membuka jalur penting bagi berbaginya informasi dan ekspresi berpolitik. Secara simultan, hal tersebut dapat meningkatkan integritas pemilu dan membuat risiko penyalahgunaan baru. Pantauan warga negara dan pelaporan perilaku media merupakan aktivitas dari bawah ke atas lainnya yang dapat berkontribusi pada pertanggungjawaban. Asosiasi jurnalis dan pemilik media juga, dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengembangkan perilaku media yang bertanggung jawab yang mendorong pemilu berintegritas.

105. Karena peran media sebagai penjaga itu, jurnalisisme telah menjadi pekerjaan berbahaya di beberapa negara demokrasi. Sejak 1992, hampir 900 jurnalis telah terbunuh di seluruh dunia. Sebagian besar jurnalis yang terbunuh adalah reporter lokal (87 persen) dan hanya sekitar 10 persen kasus yang pembunuhnya dibawa ke pengadilan. Beberapa negara yang berbahaya bagi jurnalis saat menggelar pemilu reguler seperti Filipina, Rusia, Kolombia, India, Meksiko, Turki, Sri Lanka dan Brazil. Tidak semua kematian ini berkaitan dengan liputan pemilu itu sendiri, namun serangannya berpotensi untuk mengurangi peran media dalam meminta pertanggungjawaban para kandidat dan petahana. Saat budaya intimidasi tumbuh subur melawan media, perannya untuk menegakkan integritas pemilu pun terancam.

106. Di balik organisasi masyarakat sipil dan media, partai politik bisa menjadi kekuatan penting bagi pemilu berintegritas. Partai politik berfungsi menyampaikan dengan jelas dan menyatukan pilihan warga negara, dan jika mereka menang, mewakili pilihan mereka di pemerintahan. Partai oposisi yang kuat dapat meminta pertanggungjawaban, menawarkan alternatif yang layak bagi pemilih dan memeriksa setiap tendensi kecurangan dari pesaing mereka. Tanpa

NAMFREL di Filipina

Salah satu contoh paling awal dan terkenal dari reformasi pemilu bawah ke atas berasal dari Gerakan Rakyat Nasional untuk Pemilu Bebas (NAMFREL) di Filipina. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, membuat Pemilu mendadak tahun 1986, hanya dua tahun setelah pemilu parlementer yang disaksikan dengan penuh kecurigaan.⁶⁰ NAMFREL, penjaga pemilu non-partisan, telah mengelola pengamat pemilu 1984, dan tahun 1986, berdasarkan pengalaman ini mampu membangun untuk secara efektif mengungkapkan manipulasi pemilu rezim Marcos.

Dengan bantuan gereja Katolik, NAMFREL memobilisasi setengah juta warga Filipina untuk mengamati proses pemungutan suara. Inti dari pekerjaan tersebut yaitu Operasi Perhitungan Cepat, sebuah upaya untuk memberikan jumlah komprehensif hasil yang ada dari seluruh 85.000 TPS di negara itu sebagai pencocokan terhadap hitungan resmi yang

disediakan oleh komisi pemilu. Pada akhirnya, hasil tabulasi NAMFREL dari 70 persen TPS menunjukkan perbedaan angka yang cukup besar dari hasil resmi untuk meyakinkan publik Filipina akan adanya penipuan, lalu membantu meluncurkan revolusi Kekuatan Rakyat yang memaksa Marcos turun dari kekuasaan.⁶¹

Pemilu 1986 di Filipina merupakan rangkaian pertama dari revolusi pemilu selama dua dekade berikutnya yang membentang dari Chili tahun 1988 hingga Ukraina tahun 2004 dan seterusnya, semuanya menampilkan kelompok pemantau dalam negeri yang dikelola untuk mengembangkan integritas pemilu di negara mereka sendiri. Kelompok-kelompok ini menunjukkan kekuatan advokasi domestik mulai dari kelompok masyarakat sipil dan masyarakat yang lebih luas untuk mendukung alasan pemilu berintegritas.

partai oposisi yang kuat, eksperimen dalam demokrasi tetap tergantung pada belas kasihan petahana yang memiliki kekuasaan. Ketika persaingan multipartai melemah, begitu pula partisipasi politik.

107. Dalam rangka bertindak sebagai kekuatan dari bawah ke atas untuk pemilu berintegritas, partai politik harus dibentuk atau diperbarui sebagai partai terbuka, demokratis dan kendaraan yang responsif untuk menyampaikan kebutuhan warga negara. Partai politik harus menghidupkan struktur mereka, termasuk pendidikan

internal, komunikasi dan disiplin, sementara meningkatkan penjangkauan publik untuk mempelajari pandangan warga negara dan melibatkan warga negara dalam pembangunan posisi partai. Masyarakat sipil dapat meminta partai untuk mengambil langkah seperti itu dan dapat memantau serta melaporkan perkembangannya. Pemerintah dapat memfasilitasi perkembangan dan fungsi partai politik demokratis melalui reformasi undang-undang partai politik, penataan perundangan pemilu dan ketentuan pembiayaan publik sebagai insentif bagi partai untuk berfungsi secara demokrat.

Menggerakkan Aksi Nasional

108. Upaya terpadu diperlukan untuk memfokuskan perhatian dan membantu membangkitkan komitmen untuk menciptakan insentif bagi pemerintah untuk meningkatkan pemilu mereka, dan halangan bagi pemerintah yang ingin melanjutkan pemilu yang cacat. Untuk meningkatkan kemungkinan bahwa politisi dan pemerintah petahana akan memperkuat integritas pemilu nasional, diperlukan sinergi antara atas ke bawah, bawah ke atas, transnasional dan upaya internasional. Memperkuat komitmen dan tekanan dapat memperbesar dukungan dan perlindungan pemilu berintegritas.

109. Usaha-usaha tersebut harus maju di beberapa bidang. Di bab berikut, kami menyampaikan mengenai cara pendonor dan pemerintahan demokratis dapat melanjutkan agenda ini. Di sini, kami memfokuskan pada empat batasan lintasan gagasan yang dapat meningkatkan usaha dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas untuk meningkatkan pemilu:

Jaringan Global Pemantauan Pemilu Dalam Negeri

110. Usaha dari bawah ke atas oleh masyarakat sipil dapat memperkuat mereka dengan cara menjangkau organisasi yang sependirian di negara-negara lain. Sebagai contoh, lebih dari 150 organisasi pemantauan pemilu warga negara dan jaringan pemantauan regional dari 65 negara memulai Jaringan Global Pemantauan Pemilu Dalam Negeri di awal 2009. Dibentuk untuk berintegrasi secara internasional yang melakukan praktik terbaiknya ke dalam kerja organisasi pemantauan pemilu warga negara dan untuk menjamin transparansi, pertanggungjawaban dan kredibilitas dalam proses pemilu yang lebih

luas, Jaringan memelopori penyusunan standar bagi pemantauan pemilu dalam negeri melalui Deklarasi Prinsip Global untuk Pengamat Pemilu Non-Partisan dan Pemantauan oleh Organisasi Rakyat, diluncurkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan April 2012.

111. Jaringan memberikan contoh cara aktor nasional bisa membantu menginformasikan satu sama lain mengenai topik seperti teknologi pemungutan suara, penjangkauan publik dan memelihara ketidakberpihakan dalam proses pengamatan untuk memajukan partisipasi warga negara dan integritas politik.

Kemitraan Pemerintah Terbuka

112. Kemitraan Pemerintah Terbuka (OGP) merupakan gagasan multilateral baru yang didirikan oleh Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan AS 'untuk mengamankan komitmen nyata dari pemerintah untuk mendukung transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan'. OGP berupaya untuk menganjurkan pemerintah mendukung transparansi yang lebih luas agar bekerja dengan masyarakat sipil mereka sendiri untuk membangun tujuan spesifik yang dapat diukur bagi pemerintah yang transparan, lalu mengikrarkannya secara serempak pada warga negara mereka sendiri dan pada kelompok pemerintah yang sepaham dengan komitmen mereka untuk memenuhi tujuan tersebut. OGP terlibat di demokrasi lama dan baru dari seluruh dunia, dan termasuk masukan dan saran dari organisasi masyarakat sipil transnasional seperti Yayasan Masyarakat Terbuka dan Transparansi Internasional.

113. Kami mendesak pemerintah dan pemimpin politik yang berkeyakinan sama agar bergabung dengan negara-negara yang sepaham dan bermitra dengan masyarakat sipil mereka sendiri melalui OGP untuk membuat komitmen publik dan mengambil tindakan untuk mendorong dan menjaga pemilu berintegritas, termasuk melalui dialog terbuka di negara mereka dengan Daerah Pemilihan yang berminat dan menerjemahkan tindakan yang teridentifikasi pada dialog tersebut ke dalam kebijakan, perundangan dan mekanisme implementasi—termasuk aksi dari EMB yang independen dan peraturan keuangan politik.

114. Di antara komitmen dan aksi tersebut, harus disesifikasikan gagasan untuk mendukung pluralisme di kepemilikan media, mewajibkan fungsi kendali media dan media publik bebas dari bias politik dan memberikan informasi yang akurat serta seimbang mengenai pesaing pemilu. Komitmen dan aksi juga harus menghapus segala halangan ke akses publik dan penggunaan teknologi komunikasi baru, dan mencegah penyalahgunaan teknologi tersebut untuk keuntungan atau retribusi politik petahana.

Sertifikasi Global Badan Penyelenggara Pemilu Nasional

115. Seperti yang telah dibahas di Bab Dua, memastikan kemandirian dan profesionalisme EMB merupakan salah satu tantangan terpenting menghadapi pemilu berintegritas. Untuk membantu mendukung kemandirian dan profesionalisme EMB, Komisi merekomendasikan pembuatan proses sertifikasi internasional EMB.⁶²

116. EMB dari seluruh dunia harus mengelola dan membuat proses sertifikasi suka rela dengan cara EMB menyerahkannya ke kelompok sejawat untuk

meninjau profesionalisme, kemandirian dan kompetensi mereka. Bagian penting dalam pembuatan proses seperti itu membutuhkan pembuatan deklarasi prinsip-prinsip utama dan pedoman perilaku untuk menyelenggarakan pemilu berintegritas yang akan disetujui dan diikuti EMB.

117. Sertifikasi akan membuat mekanisme penanda. Dengan menghasilkan sertifikasi standar emas, EMB mengisyaratkan bahwa mereka menghargai reputasi profesional dan yang lebih penting, pemerintah memberi tanda bahwa mereka menghargai integritas pemilu. Pada gilirannya, pemerintah yang menginginkan reputasi pemilu berintegritas perlu menghindari pelanggaran independensi EMB karena takut membahayakan standar emas EMB.

118. Sertifikasi akan memperkuat identitas diri pejabat pemilu sebagai anggota suatu profesi, dengan setumpuk persyaratan, pelatihan dan etika. Sertifikasi akan memberikan EMB akses ke dukungan sejawat, jaringan profesional internasional, dan sumber daya peningkatan kapasitas yang akan membantu mereka mencapai tujuan ini. Sertifikasi juga akan menghasilkan tekanan normatif pada EMB yang gagal memenuhi standar profesionalisme dan kemandirian, mendukung peningkatan bahkan di negara-negara yang pejabat pemilunya berusaha agar EMB tunduk pada kehendak mereka.

119. Mekanisme seperti itu dapat mengambil manfaat dari gagasan yang ada. Jaringan EMB regional yang ada di sebagian besar belahan dunia dan kelompok seperti Organisasi Pemilu Global dan Jaringan Pengetahuan Pemilu ACE sudah membawa bersama-sama administrator dan pakar pemilu dari seluruh dunia.⁶³ Contohnya, Organisasi Negara Bagian Amerika mengadakan Rapat Inter-Amerika Badan Penyelenggara Pemilu Tahunan, dimana penyelenggara pemilu dari anggota Negara bagian dapat berbagi pengetahuan

dan praktik terbaiknya. Sebagai tambahan, kolaborasi yang erat dengan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO), kelompok kerja dari OAS baru-baru ini telah menyusun rancangan Penjaminan Pemilu bagi Standar Internasional pertama, ISO 17582, yang akan membuat persyaratan minimum bahwa EMB harus memenuhinya dalam rangka menjamin integritas pemilu. Standar ini, yang diharapkan untuk disetujui pada akhir 2012, dapat memberikan langkah penting pertama untuk membangun proses yang diajukan di atas.

Pemilu Integritas Internasional

120. Untuk menambah dan memperkuat upaya-upaya di atas, kami mengajukan pembuatan organisasi masyarakat sipil baru—disebut Integritas Pemilu Internasional—yang didedikasikan untuk membawa perhatian global ke negara-negara yang berhasil atau gagal dalam menyelenggarakan pemilu berintegritas. Organisasi tersebut bisa digunakan terhadap malpraktik pemilu seperti Transparansi Internasional terhadap korupsi, akan mengisi ceruk utama dalam membantu untuk mendukung pertanggungjawaban terhadap isu pemilu dengan memberikan jalan untuk meningkatkan tekanan normatif pada pemerintahan untuk menyelenggarakan pemilu berintegritas.

121. Pada saat ini, tidak ada organisasi transnasional yang didedikasikan untuk menekan pemerintah di depan publik untuk meningkatkan kualitas pemilu mereka. Sering kali diasumsikan bahwa ini adalah pekerjaan kelompok pemantau pemilu internasional, namun kelompok seperti itu terkadang ragu untuk mengkritik pemerintah di depan umum mengenai pemilu yang mereka amati untuk dua alasan. Pertama, kelompok pemantau memerlukan akses yang berkelanjutan, karena tanpa akses tersebut, mereka tidak bisa memberikan informasi

mengenai kualitas pemilu terus menerus. Kedua, banyak kelompok pemantau percaya bahwa itu pekerjaan mereka untuk melapor dan bukan untuk memalukan pemerintah. Mereka ingin pemilu meningkat, tetapi bersikeras bahwa bukan pekerjaan mereka untuk memaksa pemerintah meningkatkan kualitas pemilu di depan umum. Seperti yang kami akan jelaskan pada bab selanjutnya, pemantau internasional telah melakukan kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas pemilu di seluruh dunia dan para pendonor dapat menggunakan laporan pemantau dengan lebih baik untuk lebih memperkuat integritas pemilu.

122. Pekerjaan untuk menekan pemerintah di depan umum harus jatuh ke pihak lain—terutama untuk warga negaranya sendiri, namun juga untuk pemerintah pendonor dan organisasi transnasional demokrasi masyarakat sipil. Namun seperti yang kita akan bahas pada bab selanjutnya, pendonor, pemerintah demokratis, dan organisasi internasional serta regional belum terlibat secara memadai untuk mempertanyakan mengenai integritas pemilu pada saat persiapan hingga pemilu, dan mereka tidak punya kekuatan dalam menindaklanjuti pertanyaan mengenai integritas pemilu setelah pemilu itu sendiri.

123. Organisasi masyarakat sipil transnasional seperti Integritas Pemilu Internasional akan memperbolehkan warga negara dan masyarakat sipil untuk terlibat saat pemerintah takut untuk melangkah. Organisasi seperti itu dapat mengumpulkan informasi dari pemantau internasional dan domestik yang terkenal dan sumber tepercaya lainnya, terutama pemilu utama yang diproyeksikan pada periode dua tahun mendatang, dan menilai lingkungan pemilu di negara bersangkutan. Laporan pemilu tahunan di setiap negara tersebut akan memungkinkan warga negara untuk melihat bagaimana pemilu negara mereka berjalan pada standar internasional dan

seiring berjalan waktu, untuk melacak apakah integritas pemilu di negara mereka memburuk atau membaik. Informasi seperti itu dapat membentuk dasar bagi tekanan dalam negeri ke pemerintah nasional untuk meningkatkan integritas pemilu dan pemerintah demokratis untuk terlibat lebih aktif lagi dalam mendukung dan melindungi integritas pemilu di mana saja.

“ Kita masih hidup di dunia yang negaranya bertindak atas kepentingan strategis mereka. Kuncinya yaitu mengingatkan pemerintahan demokratis bahwa kepentingan strategis mereka akan terlaksana lebih baik jika mendukung pemilu berintegritas. ”

Bab 4:
Aksi
Internasional
untuk Pemilu
Berintegritas

124. Demokrasi adalah aspirasi universal dan norma transnasional. Dukungan internasional untuk pemilu berintegritas—mulai dari warga negara, organisasi masyarakat sipil, pemerintahan demokratis, dan organisasi regional dan antar pemerintah—harus didorong dan disambut. Di saat yang bersamaan, dukungan internasional bagi pemilu berintegritas menimbulkan tanggung jawab, termasuk menghargai prinsip kepemilikan setempat, berkomitmen untuk peningkatan kapasitas setempat dan lembaga yang diperlukan bagi demokrasi agar kemandirian-berkelanjutan dan menjadi transparan serta dapat dipertanggung-jawabkan. Seperti upaya internasional pada pembangunan dan aksi kemanusiaan, pendukung demokrasi harus berjuang untuk ‘Tidak Merugikan’. Agar pemerintahan demokratis efektif dalam mendukung integritas pemilu di negara lain, maka mereka harus memastikan bahwa pemilu mereka sendiri dilakukan dengan integritas.

125. Ada tipe-tipe yang berbeda dari aktor internasional saat mendukung dan melindungi integritas pemilu secara global. Senarai tidak menyeluruh termasuk organisasi masyarakat sipil transnasional yang membantu warga negara mengerahkan untuk pemilu yang bersih, membantu partai politik agar efektif dan membangun para pesaing politik, membantu parlemen agar lebih efektif dalam mewakili para konstituen, dan memberdayakan perempuan untuk memiliki suara yang lebih besar dan partisipasi dalam pemilu politik; organisasi internasional yang membantu menyelenggarakan dan mengelola pemilu serta organisasi antar pemerintah yang mengamati pemilu; organisasi internasional dan regional yang menengahi konflik pemilu; dan pemerintah demokratis yang

membiayai pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung demokrasi, dan kadang-kadang terlibat secara diplomatis untuk mendukung dan melindungi integritas pemilu.

126. Aktor internasional paling kontroversial adalah pemerintah demokratis. Disebut kontroversial karena dukungan mereka terhadap pemilu yang murni umumnya cenderung tidak dikelola dengan baik dan disetujui dengan menyaingi kepentingan nasional. Sementara dukungan retorik mereka terhadap pemilu berintegritas bisa saja konstan, namun tidak demikian dengan catatan mereka dalam menanggapi pemilu yang cacat. Pada beberapa kasus, kepentingan mereka terletak pada dukungan terhadap kandidat yang disukai, bukan pada pemilu berintegritasnya sendiri. Sering kali, pemerintahan demokratis membutuhkan matanya pada malpraktik pemilu oleh rezim dan petahana yang dengannya memiliki hubungan yang menguntungkan. Mengingat kembali era Perang Dingin, sejarah mencatat diantaranya dukungan untuk kudeta dan intervensi yang menggerogoti pemerintahan populer yang terpilih.

127. Kita masih hidup di dunia yang negaranya bertindak atas kepentingan strategis mereka. Kuncinya berada pada mengingatkan pemerintahan demokratis bahwa kepentingan strategis mereka akan terlaksana lebih baik jika mendukung pemilu berintegritas. Bukan hanya pemerintah demokratis berbagi kepentingan dalam penyebaran demokrasi sebagai benteng perdamaian internasional, tetapi mereka juga harus belajar bahwa hubungan bilateral diperkuat ketika mitra mereka memiliki legitimasi demokratis yang diperoleh melalui pemilu yang murni.

Dukungan Internasional bagi Demokrasi: Praktik Terbaik dimulai dari Rumah

128. Salah satu peran terpenting bahwa demokrasi dapat memainkan peranannya dalam membantu untuk mendukung pemilu berintegritas di mana saja adalah untuk mencontoh praktik terbaik melalui perilaku pemilu mereka. Demokrasi yang menghormati integritas pemilu memberikan contoh menarik bagi yang lainnya. Saat demokrasinya lebih lama, yang secara tradisional telah menjadi pendonor pendampingan internasional, memberikan bukti ketulusan dan komitmen: mereka memberi contoh dan bukan hanya omong kosong tentang pemilu berintegritas. Saat demokrasinya lebih baru, lebih miskin, mereka memberikan kebohongan pada suatu mitos bahwa pemilu adalah kemewahan yang tidak bisa dimiliki rakyat miskin.

129. Kami khawatir ketika demokrasi yang lebih lama mengirimkan sinyal yang membahayakan ke seluruh dunia tentang integritas pemilihan. Contohnya, di AS, ratusan juta dolar dihabiskan untuk serangan iklan tanpa henti dengan sedikit pelaporan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk mendanai, yang melakukan kerusakan gamblang pada reputasi demokrasi AS. Perilaku tersebut mengirimkan pesan bahwa semua bisa terjadi bila berkaitan dengan keuangan politik dan bahwa kepentingan berduit lebih penting daripada pemilu berintegritas.

130. Di Eropa, resesi ekonomi dan tekanan hutang yang buruk menempatkan demokrasi di bawah siksaan hebat. Politik pemotongan belanja dan penghematan anggaran, apapun manfaatnya, sulit bagi semua bentuk pemerintahan, termasuk demokrasi, namun mencengangkan betapa cepatnya para pemimpin Eropa telah jatuh ke dalam jebakan teknologi, memercayai bahwa legitimasi publik tidak diperlukan

untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan ekonomi yang sulit. Ketika Uni Eropa (EU) memberitahu politisi terpilih bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali mengimplementasikan langkah-langkah penghematan radikal, maka hal itu memberitahu rakyat mereka bahwa mereka dapat 'memilih pemerintah bukan kebijakan'.⁵⁴ Ketika para pemimpin pada demokrasi lebih lama nampak takut pada pemilihnya, maka hal tersebut mengirimkan pesan mengerikan ke seluruh dunia mengenai keyakinan mendasar pada praktik berdemokrasi.

Keterlibatan Internasional dalam pemilu yang cacat

131. Pemilihan yang cacat yang luar biasa buruk merusak semua tujuan yang diharapkan demokrasi dan organisasi internasional. Kekerasan pemilu merusak keamanan mendasar dan hak asasi manusia. Ketidakstabilan politik merusak kepercayaan ekonomi dan berkontribusi pada perang modal. Ketika pemilihan tak ada legitimasi domestik, kemungkinan adanya kekerasan politik meningkat. Kekerasan politik kerap dipersiapkan oleh mereka yang berusaha berpegang pada kekuasaan dengan menekan dukungan oposisi menuju pemungutan suara, walau dapat keluar pada skala besar ketika hasil pemilihan itu sendiri tidak diterima sebagai hasil kredibel dan ketika pihak yang kalah berusaha menjungkirbalikkan hasil yang resmi.

132. Saat pemilihan yang sangat cacat berlangsung, pemerintah dan organisasi internasional sangat sering tidak mau atau tidak berada dalam posisi menanggapi. Hanya persentasi kecil dari kasus pemilihan yang cacat ditanggapi aktor internasional dengan insentif positif untuk menyampaikan kecacatan atau tindakan disipliner untuk menghukum malpraktik pemilu. Alasannya jelas dan berhubungan dengan pertimbangan

kepentingan vital negara yang lebih besar, yaitu takut memicu ketidakstabilan, kurangnya kepercayaan bahwa oposisi dalam negeri akan menang, dan pada beberapa kasus, ketidakjelasan mengenai apakah cacat karena hasil malpraktik pemilu atau kesalahan manajemen pemilu, walau keduanya meniadakan kehendak elektora.

133. Dalam beberapa kasus, umumnya karena kekerasan skala besar, pemerintah atau organisasi internasional menanggapi dengan mediasi. Upaya tersebut memiliki catatan yang campur aduk. Ketika diambil hanya karena untuk mengakhiri kekerasan pascapemilu, mediasi menanggung risiko memberikan lawan politik dengan insentif untuk menimbulkan kekerasan seperti itu dari pertama. Jika politisi menghadapi pilihan antara kekalahan pada pemilihan dan menyerahkan kekuasaan atau menggunakan kekerasan untuk memeras jalan mereka ke pemerintah persatuan

nasional, kemungkinan kami akan melihat lebih banyak lagi, bukan berkurang, kekerasan dari mediasi pasca pemilu.

134. Riset untuk Komisi menyarankan bahwa jika aktor internasional belum terlibat dengan satu negara selama persiapan hingga pemilihan yang cacat, besar kemungkinan, mereka tak akan terlibat saat pemilihan berlangsung.⁶⁵ Dan ketika para aktor internasional menunggu hingga pemilihan yang cacat yang luar biasa buruk berlangsung, pilihan instrumen mereka cenderung menyempit: mereka dapat mengandalkan langkah yang menghukum dan sanksi, merisikokan bahwa nantinya akan ada pengaruh jang pendek terhadap hasil pemilihan, atau mereka dapat terlibat dalam mediasi yang berisiko membatalkan legitimasi pemilihan dengan menghasilkan capaian yang tidak mencerminkan kehendak rakyat.

Kenya dan DRC: Kekontrasan pada Perjanjian Internasional

Kekerasan di Kenya pasca pemilu 2008 berakhir melalui mediasi internasional oleh Kofi Annan, Benjamin Mkapa dan Graça Machel, di bawah perlindungan Uni Afrika, dengan dukungan internasional yang luas namun terkoordinasi. Setelah 41 hari negosiasi, para pesaing presidensial, Mwai Kibaki dan Raila Odinga, menandatangani Dialog Nasional dan Perjanjian Rekonsiliasi. Perjanjian membentuk pemerintahan koalisi berbasis 50-50, dengan Kibaki sebagai Presiden dan Odinga sebagai Perdana Menteri. Itu juga menghasilkan peta panduan untuk proses peninjauan konstitusional yang memberikan Kenya konstitusi baru tahun 2010.

Tekanan internasional yang disinkronisasi sangat penting untuk membawa prinsip-prinsip menjadi sesuatu yang bermanfaat tepat pada waktunya. Panel Uni Afrika Tokoh-tokoh Unggulan, terdiri dari Kofi Annan, Graça Machel dan Benjamin Mkapa, dibebani dengan peranan memfasilitasi negosiasi. Panel juga diberi mandat untuk mendukung koalisi pemerintah dalam mengimplementasikan perjanjian yang dicapai.

Panel mendesak bahwa dalam rangka mengakhiri siklus kejahatan selama pemilihan, segala perjanjian gencatan senjata harus menyertakan agenda reformasi jangka panjang. Persetujuan

Nasional Rakyat Kenya berhasil dalam hal ini. Dengan menguraikan secara detail agenda reformasi, maka menjamin ruang untuk renegotiasi bagi lembaga pemerintahan Kenya dengan semua kelompok yang berkepentingan.

Implementasi Persetujuan Nasional telah menjadi tanggung jawab pemerintah koalisi, namun juga telah memberikan dampak melalui beragam pemangku kepentingan termasuk para pemimpin agama, komunitas bisnis, masyarakat sipil, media dan mitra pembangunan Kenya. Semua sektor masyarakat Kenya kini mengendalikan proses implementasi, yang menyediakan pemeriksaan yang tak ternilai atas Parlemen dan pemerintah koalisi. Aktor internasional terus bekerja dengan pemerintah dan kelompok pemangku kepentingan ini. Keterlibatan Panel masih berlanjut dalam antisipasi pemilu tahun yang akan datang di Kenya.

Model Kenya—ditopang keterlibatan internasional dengan kepemilikan lokal yang diberdayakan—berada dalam perbedaan dramatis terhadap pendekatan pada malpraktik pemilu di Republik Demokrasi Kongo (DRC) selama kurang lebih periode yang sama.

Di Republik Demokrasi Kongo, pemilihan presiden 2006 juga menggantung dalam kontroversi. Terlepas dari dukungan internasional besar-besaran, pemilihan-pemilihan ini juga disertai dengan kekerasan, tapi tidak seperti Kenya 2008. Bagaimanapun, pelaksanaan pemilihan mencampakkan negara tersebut ke dalam krisis berkepanjangan yang berlangsung selama hampir enam bulan.

Sementara terdapat banyak keterlibatan internasional dan pendampingan ke DRC saat persiapan menuju pemilihan 2006, sebagai akibatnya, muncul sedikit tindak lanjut. Para aktor internasional dan dalam negeri dengan cepat kembali ke bisnis seperti biasanya, dan sedikit pemikiran diberikan mengenai cara DRC dapat memastikan bahwa pemilihan berikutnya tahun 2011 akan berlangsung damai dan memenangkan keyakinan publik serta legitimasi.

Lebih dari setahun sebelum pemilihan bulan November 2011, organisasi demokrasi nasional dan internasional dan kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa Presiden Joseph Kabila memanipulasi peraturan dan lembaga pemilu. Seperti alarm yang diabaikan.

Pemungutan suara 2011 di DRC dijalankan serabut, mendorong kelompok lokal meneriakan penipuan dan politisi oposisi mengklaim bahwa sekali lagi, pemilu telah dirampas oleh Kabila. Pengamat internasional melaporkan bahwa tidak mungkin mengetahui siapa yang menang. Kekerasan telah pecah di seluruh DRC, mendorong ribuan warga negara untuk melarikan diri dari rumah mereka.

Terlepas dari menjadi pemilu yang cacat yang luar biasa buruk, perhatian diplomatis yang sedikit dan tenaga dihabiskan untuk berusaha menangani konflik. Terus diusahakan upaya bersama untuk memastikan bahwa pemilihan berikutnya di DRC bukanlah pengulangan tahun 2006 atau 2011.

135. Riset yang sama menunjukkan bahwa ketika aktor internasional terlibat sebelum pemilu yang berpotensi akan cacat dan penggunaan insentif positif atau campuran positif/strategi yang menghukum, kualitas pemilihan kerap meningkat pada hari pemberian suara. Keterlibatan dini internasional tidak mengubah pemilihan yang cacat yang luar biasa buruk menjadi contoh integritas pemilu yang patut ditiru. Namun kami melihat bukti perubahan positif pada kualitas pemilihan yang dapat dibangun. Dan menyarankan bahwa jika terjadi tindak lanjut, jika terdapat perhatian jangka panjang, dan jika laporan pemantauan pemilu digunakan sebagai bagian proses jangka panjang yang didedikasikan untuk meningkatkan integritas pemilu, lalu kami akan melihat perubahan positif yang lebih besar lagi.

Masyarakat Internasional Harus Memiliki Garis Merah

136. Program internasional untuk mendorong dan melindungi integritas pemilihan harus menyertakan ‘garis merah’, sebagai standar yang dapat memaksa tanggapan internasional dan regional yang lebih bersatu untuk menanggapi terhadap contoh paling buruk dari malpraktik pemilu. Satu ‘garis merah’ yang memungkinkan adalah malpraktik pemilu yang naik ke tingkatan pelanggaran hukum konstitusional perebutan kekuasaan. Beberapa organisasi regional, seperti AU, OAS dan Persemakmuran, berjanji untuk menanggapi secara tegas kudeta militer. Organisasi regional harus memperluas janji mereka dengan menyertakan kasus petahana yang kalah menolak turun dan menyerahkan kekuasaannya, seperti yang diakui dalam Piagam Afrika untuk Demokrasi, Pemilihan dan Pemerintahan (Pasal 24.4) dan harus membuat mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kasus-kasus melibatkan penggunaan kekerasan politik

yang disengaja untuk mencabut hak pilih para pemilih dan menekan oposisi atau meniadakan pemilu berintegritas.

137. Sekali lagi di sini, kesiapsiagaan adalah kuncinya. Aktor internasional harus penuh perhatian pada berbagai persoalan jauh sebelum hari pemilihan. Persoalan tersebut harus dijernihkan dalam artian harapan melalui siklus pemilu. Tanda-tanda awal malpraktik pemilu harus mendesak keterlibatan politik tingkat tinggi. Jika pemilu masih melintasi garis merah, aktor internasional harus bereaksi cepat dan dengan tega menindaknya.

Pemantau Pemilu Internasional

138. Pemantauan pemilu merupakan perangkat kritis untuk mendorong dan melindungi integritas pemilu. Pendorong internasional dan pemerintahan demokratis, bagaimanapun, belum menggunakan perangkat ini untuk efek yang lebih besar. Secara khusus, mereka tidak sepenuhnya mengambil keuntungan dari laporan pemantauan pra pemilihan untuk melakukan lebih banyak pencegahan terhadap pemilihan yang cacat yang luar biasa buruk dan penggunaan politik untuk kekerasan selama pemilihan. Para pendonor dan pemerintah demokratis juga tidak melakukan banyak hal untuk menggunakan laporan pemantau setelah pemilihan untuk memperkuat proses berpolitik dari integritas pemilu dan perubahan berdemokrasi melalui siklus pemilu sebelum pemilihan berikutnya. Akhirnya, pendonor dan pemerintah belum cukup berbuat sesuatu untuk membangun kapasitas pemantauan pemilu dalam negeri.

139. Pemantauan pemilu telah menjadi media potensial bagi perubahan berdemokrasi dengan tiga cara: pertama, telah mendampingi transisi demokrasi di negara otoriter; kedua, telah meningkatkan kualitas pemilihan dari waktu ke waktu;

dan ketiga, telah membantu diplomasi yang berusaha memulihkan pemilu yang cacat, baik pencegahan sebelum pemungutan suara berlangsung atau selama pemungutan suara dan perhitungan setelah pemilihan.⁶⁶

140. Antara 1990 dan 2005, pemantauan pemilu internasional menjadi norma global dan angka misi pemantauan berkembang secara dramatis. Dengan perluasan ini, jika pemantauan merupakan media efektif untuk memperluas demokrasi, maka seseorang akan berharap bahwa semuanya akan sama, pemantauan akan mempersulit petahana yang otoriter untuk dipilih kembali. Dan memang, semua data membuktikannya. Pada periode pemantauan pemilu, persentase petahana otoriter yang dipilih kembali menurun dengan hampir 40 persen.⁶⁷ Di beberapa negara tertentu di dunia, terutama di Afrika, penurunannya lebih besar lagi. Jelas sekali, banyak faktor yang berkontribusi terhadap transisi pemilihan, dan pemantauan pemilu hanya satu di antaranya. Bagaimanapun, hasil dari waktu ke waktu dan melintasi kawasan, secara mengejutkan konsisten dengan hipotesis bahwa pemantauan pemilu mendukung perubahan berdemokrasi. Fakta bahwa pemilu yang dipantau mengarah pada pergantian petahana yang lebih besar dibandingkan dengan pemilu yang tidak dipantau, sekali lagi konsisten dengan ide bahwa pemantau pemilu membantu menghasilkan perubahan berdemokrasi.

141. Banyak kelompok pemantau bercita-cita untuk mendampingi peningkatan pemilihan dalam jangka panjang di banyak negara yang menyatakan menginginkan perubahan berdemokrasi. Di sini, hasilnya campur aduk, dengan satu cendekia melaporkan bahwa misi pemantauan berulang kali menyebar ke negara dari waktu ke waktu, kualitas pemilihan cenderung meningkat; bagi cendekia lainnya, hasil ini berlaku untuk Eropa Tengah dan Timur dan bukan tempat lainnya.⁶⁸

142. Bagi sebagian besar profesional dan kelompok pemantauan yang berpengalaman, stereotip lama para pemantau yang diterjunkan ke suatu negara seminggu sebelum pemilihan dan semata-mata berfokus pada malpraktik di hari pemungutan suara, sama sekali salah. Pemantau terbaik telah mempelajari bahwa pemalsuan pemilu dan malpraktik kerap berlangsung berbulan-bulan dan terkadang bertahun-tahun sebelum satu pemilihan dan bahwa pemantauan pemilihan harus dilibatkan jauh lebih dini pada siklus pemilu. Bukti empiris bahkan menunjukkan bahwa awal 2005, misi pemantau paling berpengalaman ternyata lebih lama daripada di awal 1990an. Organisasi pemantau utama menyetujui Deklarasi Prinsip untuk Pemantauan Pemilihan Internasional 2005 dan pedoman perilaku, yang mengharmonisasi standar bagi pemantauan. Hasil bersihnya yaitu para pemantau kini secara rutin menghasilkan informasi yang akan memungkinkan pemerintahan demokratis, organisasi internasional dan organisasi regional untuk secara sadar lebih terlibat (dan lebih cepat) terhadap lebih banyak lagi proses fundamental mengenai integritas pemilu.

143. Seperti yang kita catat sebelumnya, tindakan dan perhatian dini, ketika dikaitkan dengan insentif positif, sering meningkatkan mutu pemilihan. Tindakan dini tersebut harus menjadi norma, bukan pengecualian. Dan di luar penggunaan laporan pra pemilihan untuk tindakan dini, pendampingan pendonor jangka panjang harus secara eksplisit berhubungan dengan rekomendasi oleh laporan pemantau pemilu dalam rangka mencapai upaya bersinergi yang lebih besar dalam peningkatan kemandirian-berkelanjutan, pemerintahan demokrasi setempat. Harus menjadi praktik yang jamak bahwa ada di dalam negeri, dialog pascapemilihan di antara kelompok pemantau internasional, kelompok pemantau dalam negeri, pejabat pemilu berwenang

dan aktor politik di negara-negara yang pemilihannya telah dipantau. Dialog seperti itu mengidentifikasi area untuk upaya reformasi, mempertimbangkan potensi pendampingan internasional untuk reformasi seperti itu dan meningkatkan kesiapsiagaan gabungan bagi pemilihan berikutnya.

144. Perubahan-perubahan ini harus disesuaikan dengan investasi besar dalam peningkatan kapasitas dan kredibilitas pemantauan pemilihan dalam negeri. Dalam jangka panjang, aktor dalam negeri merupakan pelaku penting bagi pemilu berintegritas. Seperti yang kami nyatakan pada Bab Tiga, kelompok warga negara non-partisan telah sukses memantau pemilihan di lebih dari 90 negara, sering membuat kontribusi sangat penting untuk pemilu berintegritas. Pada gilirannya, kelompok warga negara tersebut kini membentuk jaringan global pemantauan dalam negeri yang menjanjikan yang secara rutin berbagi praktik terbaik dan mendiskusikan strategi untuk mencapai hasil terbaik.

Peningkatan Kapasitas untuk Tata Laksana Demokrasi

145. Demokrasi harus dimiliki secara lokal. Harus terdapat peserta pemilihan yang cergas dan dimobilisasi bagi perubahan demokrasi. Dan harus terdapat lembaga dalam negeri yang menghormati norma demokrasi dan memiliki kapasitas untuk menyampaikan layanan.

146. Pendonor internasional menginvestasikan beberapa milyar dolar setiap tahun untuk membangun kapasitas setempat bagi pemerintahan demokratis. Terlepas dari besarnya investasi, sulit untuk mengevaluasi apakah pendampingan tersebut efektif dalam membangun kapasitas tersebut. Sementara beberapa kesulitan terletak pada sifat tugasnya, beberapa kesalahan terletak pada pendonor, penyedia

bantuan dan pembangun serta manajer proyek yang belum memprioritaskan evaluasi dan belum memasukkan evaluasi praktik terbaik ke dalam rancangan proyek mereka. Terlalu sering, proyek dievaluasi dari keluaran daripada capaian. Terlalu sering, proyek ditunjukkan pada pengembangan administrasi publik dan memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan pemerintahan demokratis dan proses politik yang memerlukannya agar berfungsi.

147. Kapasitas untuk pemerintahan demokratis melibatkan saran teknis dan insentif politik. Pendampingan internasional sering disesali sebagai pemasok perbaikan teknis untuk kendala politik semata, namun saran teknis, sumber daya dan inovasi dapat menjadi bahan utama untuk meningkatkan integritas pemilu. Untuk memberikan dua contoh penting, teknis tabulasi suara paralel oleh organisasi masyarakat sipil independen dan partai politik dapat meningkatkan kepercayaan pada hasil dan mengurangi volatilitas pasca pemilu. Kampanye anti kekerasan berbasis komunitas, pemantauan terhadap perkembangan kekerasan sistematis dan jaringan peringatan dini, serta penggunaan laporan warga negara melalui hotline dan situs web dikombinasikan dengan informasi yang diverifikasi oleh pemantau terlatih dapat menghalangi dan membatasi dampak kekerasan pemilu.

148. Kadangkala pendampingan internasional gagal dalam menjawab aspek politik peningkatan kapasitas demokrasi. Sering proyek kurang tercapai, bukan karena kegagalan perancang proyek, namun karena pemerintah nasional dan pemimpin setempat melihat insentif yang kecil untuk lebih sekedar perubahan kosmetik politik dan sepenuhnya terbuai etos demokrasi di balik proyek. Sering, pemerintah donor tidak memberikan dukungan politik, dorongan dan insentif bagi pemerintah nasional untuk mengimplementasikannya. Dengan itu, pendonor sering gagal memberikan

Dialog Mesir-Indonesia mengenai Transisi Demokratis

Tahun 2008, Indonesia meresmikan Forum Demokrasi Bali (BDF), bersama-sama membawa perwakilan baik dari dalam dan luar kawasan untuk memelihara dialog dan menghasilkan ide-ide tentang demokrasi di Asia. Sebagai forum antar pemerintah, BDF telah berkembang dari 42 negara pada tahun pertamanya hingga lebih dari 80 negara di 2011, sebagai tambahan pada kelompok seperti ASEAN, EU dan PBB. BDF datang memberi isyarat akan komitmen yang sebenarnya oleh Indonesia dengan mendukung nilai-nilai demokratis di Asia.

Satu manifestasi konkrit dari komitmen ini adalah Dialog Mesir-Indonesia untuk Transisi Demokrasi, serangkaian lokakarya yang dikelola

melalui Lembaga untuk Perdamaian dan Demokrasi berbasis di Bali untuk berbagi pengalaman dari transisi Indonesia ke demokrasi dengan aktivis dan pemimpin Mesir. Lokakarya ini menyediakan forum diskusi tentang isu seperti kebebasan media, manajemen pemilu, keadilan transnasional, peran militer dalam demokrasi politik dan peran Islam dalam demokrasi.⁶⁹

BDF hanya satu contoh dari potensi yang berkembang untuk keterlibatan internasional model baru untuk mendukung integritas pemilu dan demokrasi. Demokrasi yang muncul dan terkonsolidasi seperti Indonesia dapat mengambil peran lebih menonjol dan semakin meningkat di area ini.

pengelolaan politik yang memfasilitasi keberhasilan implementasi. Pendampingan internasional harus melampaui sekedar saran teknis dan menciptakan insentif politik bagi implementasi.

149. Pendampingan juga harus beradaptasi pada tantangan baru yang dihadapi pemerintahan demokratis. Sebagai contoh, pendonor internasional perlu mempertimbangkan apa yang diperlukan EMB untuk menanggapi tantangan baru seperti pengawasan dana publik dan pendanaan pribadi partai dan kampanye, peraturan berpolitik media dan iklan, serta memastikan transparansi dan pertanggungjawaban inovasi teknologi.

150. Tren mengkhawatirkan lainnya dari peningkatan kapasitas internasional yaitu mendorong pengadopsian teknologi pemilu yang lebih mahal daripada kemampuan

negara mereka sendiri yang mampu dijangkau dalam jangka panjang, berakibat pada ketergantungan terhadap vendor internasional untuk mengoperasikan dan mengontrol teknologi penting dan prosesnya. Banyak pendampingan untuk peningkatan kapasitas kehilangan poin bahwa jika anda meningkatkan kapasitas setempat, akan berkurang ketergantungan pada pendampingan internasional. Semua pendampingan harus mempunyai kepemilikan nasional dan keberlangsungan sebagai tujuannya. Pendampingan demokrasi, walaupun merupakan usaha jangka panjang, seharusnya tidak menimbulkan ketergantungan pada intervensi dan pengawasan internasional. Pendampingan harus hemat biaya, berkelanjutan dan memadai secara teknologi, dengan perhatian yang diberikan kepada target untuk mengakhiri pendampingan internasional.

Mengatasi Strategi Inkoheren dalam Pendampingan Pemilu

151. Pendampingan demokrasi, seperti yang dirancang dan diberikan saat ini, menderita dua jenis ketidaklogisan. Pertama, pendukung demokrasi internasional tidak mendampingi prioritas dan strategi dalam pemilu berintegritas. Kedua, pendampingan demokrasi umumnya sebuah renungan dalam pendampingan pembangunan dan keamanan. Ketidaklogisan terdahulu mencegah penggunaan terbaik sumber daya dan yang terakhir berarti bahwa agenda dan kepentingan donor lainnya sering mengandalkan pendampingan demokrasi.

152. Strategi mendukung dan melindungi integritas pemilihan dapat mengatasi kedua kendala ini. Strategi seperti itu memiliki beberapa dimensi:

153. *Pertama*, pendonor harus memprioritaskan untuk membantu pemerintah dan warga negara mengatasi lima tantangan dasar terhadap integritas pemilihan yang dijelaskan dalam laporan ini: membuat ketaatan hukum; menciptakan EMB yang profesional, cakap dan independen yang melakukan pemilihan transparan yang pantas mendapatkan kepercayaan publik; membangun demokrasi sebagai sistem keamanan bersama dengan mengurangi taruhan pemenang mendapatkan segalanya/“winner-take-all” dan mendukung oposisi politik serta partai; menghapus rintangan menuju partisipasi yang sama; dan mengendalikan keuangan politik.

154. *Kedua*, pendonor harus membantu membangun kapasitas warga negara setempat untuk memantau, melaporkan dan menilai pemilihan mereka sendiri. Agar demokrasi mandiri-berkelanjutan, pemantauan pemilihan dalam negeri harus melengkapi—dan akhirnya menggantikan—pemantauan pemilihan internasional.

155. *Ketiga*, harus ada penggunaan strategi yang lebih baik dari laporan pemantau pemilihan, baik internasional dan dalam negeri, untuk meningkatkan integritas pemilihan jangka panjang. Pemerintah donor harus menggunakan laporan pemantauan pra pemilu untuk terlibat dengan pemerintah dan masyarakat sipil sebelum pemilihan bermasalah berlangsung. Buntut pemilihan, harus menjadi prosedur standar bagi pemantau internasional dan dalam negeri, masyarakat sipil, pendonor dan pemerintah untuk menilai kinerja mereka dan menyusun patokan serta prioritas bagi integritas pemilihan yang lebih besar sebagaiantisipasi pemungutan suara berikutnya.

156. *Keempat*, agar pendekatan ini berhasil, pendonor harus mengubah pendekatan mereka terhadap aktivitas pendanaan pemilihan, yang cenderung meledak-ledak dan menggemparkan—jumlah yang besar dihabiskan mendekati hari pemilihan, dan sedikit dihabiskan setelah atau sebelumnya. Pendekatan yang diajukan di sini mensyaratkan bahwa pendonor lebih banyak menghabiskan dana diluar tahun pemilihan umum untuk memperkuat EMB, pendidikan pemilih, reformasi pemilu dan aktivitas jangka panjang lainnya yang dapat menyamakan kancah permainan pada pemilu dan sedikit pada pemilihan itu sendiri.

157. *Kelima*, pendonor perlu memahami kebenaran krusial bahwa pemilihan merupakan bagian dari proses dan alat politik masyarakat yang luas yang harus disimak dan dipertanggungjawabkan. Tanpa proses demokrasi politik yang mengarah dan melampaui pemilihan, tak akan ada pemilu berintegritas atau hubungan kerja demokratis antara warga negara dan pemerintah. Sementara terdapat peran pendampingan teknis dalam mendukung dan melindungi integritas pemilihan, hal ini bukanlah pengganti perhatian dan keterlibatan politik. Teknologi bagi demokrasi harus disertai oleh diplomasi bagi demokrasi. Hal ini tidak

perlu ditangani secara rumit; sesungguhnya, paling baik jika dikerjakan dengan kelembutan. Beberapa dari pendampingan terpenting dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan demokratis yaitu melalui dialog dan berbagi pengalaman. Salah satu pengembangan terpenting berkaitan dengan keinginan demokrasi baru—banyak yang berhadapan dengan tantangan yang tidak dialami demokrasi tradisional, seperti kemiskinan, pembagian masyarakat, agama dan polarisasi etnis, dan campur tangan militer dalam politik—untuk berbagi pelajaran satu dengan lainnya sementara dijelaskan bahwa integritas pemilihan diperlukan untuk legitimasi demokrasi.

158. *Keenam*, pendonor harus berusaha keras untuk menangani ketidaklogisan pendampingan mereka sendiri, dimana pendampingan demokrasinya, pendampingan pembangunan dan kerja sama keamanan diperlakukan sebagai aktivitas terpisah. Demokrasi, keamanan dan pembangunan itu terkait. Keamanan internasional dan kebijakan pembangunan memiliki pengaruh mendalam pada peluang untuk memperkuat integritas pemilu dan aspek demokrasi lainnya. Terlalu sering, pendampingan pembangunan dan keamanan mengambil bentuk yang merusak proses demokrasi.

159. *Ketujuh*, perubahan diperlukan pada pendampingan perkembangan internasional dan kerja sama keamanan; khususnya, dukungan untuk pemilu berintegritas, kapasitas dan lembaga yang memungkinkan terselenggaranya pemilihan, harus diperlakukan sebagai bagian utuh pada pendampingan pembangunan dan keamanan. Hal ini akan memerlukan kerangka kerja dimana pembangunan sebagai hal yang berkaitan dengan kebebasan mendasar, hak berpolitik dan pemberdayaan warga negara—dan keamanan merupakan garansi terbaik melalui pemerintahan demokratis.

160. *Kedelapan*, pada kerangka seperti itu, pembangunan harus berkontribusi pada peningkatan pluralisme politik begitu pula mode pemerintahan demokratis dan budaya berpolitik yang merendahkan taruhan pemilihan. Banyak dari pendampingan pembangunan internasional secara efektif membantu cabang eksekutif pemerintah. Bahkan dukungan masyarakat sipil, jika tidak sensitif ke ketidaksetaraan politik dan ekonomi di masyarakat, dapat memperuncing ketidakseimbangan politik dalam proses demokrasi. Pendonor dan negara-negara mitra harus memberikan prioritas pada penguatan berbagai aktor politik yang terlibat dalam proses demokrasi negara, termasuk parlemen, partai politik dalam oposisi dan dalam pemerintahan, media independen dan EMB yang independen.

161. *Kesembilan*, kerja sama keamanan internasional perlu memberikan pertimbangan yang lebih dalam terhadap kebijakan dan program yang menunjang integritas pemilihan. Pendampingan keamanan dan kemitraan harus menghargai dan memelihara pluralisme politik dan ketaatan hukum yang menopang stabilitas dan demokrasi pada jangka panjang. Pemilihan yang curang dikaitkan dengan kekerasan sipil dan ketidakstabilan, juga menempatkan keamanan manusia dalam bahaya. Kejadian politik 2011–2012 telah menunjukkan sesuatu, yaitu kemitraan keamanan dengan para pemimpin yang memelihara kekuasaan melalui pemilihan palsu yang dibangun dengan dasar yang tak kokoh. Keamanan sejati paling baik dibangun di atas batu karang legitimasi demokrasi.

162. Negara-negara pasca konflik memerlukan perhatian khusus dalam hal ini. Organisasi internasional dan pemerintah donor harus mendekati pembangunan

perdamaian sebagai proses jangka panjang yang memerlukan persaingan politik terbuka untuk menyusun konflik masyarakat dan resolusinya. Persaingan demokrasi tidak boleh mengorbankan altar kestabilan jangka pendek. Hal ini membutuhkan perwalian perjanjian perdamaian internasional untuk secara serius mengerjakan tugas membangun demokrasi sebagai sistem keamanan bersama, dan keperluan untuk menghasilkan perjanjian antara bekas partai yang bertikai yang mengurangi pemenang yang mendapatkan semua keuntungan politik.

penekanan pada inklusi, transparansi dan pertanggungjawaban—dapat menjadi katalis untuk pemerintahan yang lebih baik, hak lebih diperkuat, keamanan dan pembangunan manusia yang lebih besar.

Demokrasi dan Pemilu Berintegritas dan Kerangka Pembangunan Pasca 2015

163. Saat kami menyelesaikan pekerjaan kami, pemerintah dan masyarakat sipil telah mulai mempertimbangkan kerangka pembangunan pasca 2015, saat tenggat waktu yang disiapkan untuk pertemuan MDG akan berakhir. Kami mendesak bahwa kerangka baru mengakui bahwa kemerdekaan dan kesetaraan politik esensial bagi pembangunan, dan menekankan kebutuhan bagi rakyat di mana saja untuk berpartisipasi dalam keputusan politik yang mempengaruhi mereka. Pekerjaan penting telah diselesaikan dalam hal ini oleh demokrasi yang lebih baru, dipimpin oleh Mongolia, yang merasa bahwa delapan prinsip MDG pertama mengabaikan sentralitas demokrasi dalam pembangunan dan menciptakan prinsip MDG kesembilan yang difokuskan pada hak asasi manusia, pemerintahan demokratis dan anti-korupsi.

164. Pada kerangka baru ini, pemilu berintegritas merupakan patokan dan juga instrumen. Pemilu berintegritas memberikan jaminan terbaik kemerdekaan, kesetaraan politik dan pertanggungjawaban demokrasi. Suatu program untuk menghasilkan pemilu berintegritas—dengan

Bab 5: **Rekomendasi**

Rekomendasi pada tingkat Nasional

1. Untuk mendorong dan melindungi integritas pemilu, pemerintah harus:
 - membangun ketaatan hukum dalam rangka memastikan warga negaranya, termasuk pesaing politik dan oposisi, memiliki perlindungan hukum untuk menjalankan hak mereka yang berhubungan dengan pemilu;
 - menghasilkan EMB yang profesional, independen dan kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak, termasuk penjaminan akses yang tepat waktu ke keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dan mandat untuk mengelola pemilihan transparan yang pantas mendapatkan kepercayaan publik;
 - mengembangkan lembaga, proses dan jaringan yang menghalangi kekerasan berkaitan pemilu dan, jika pencegahan gagal, pelaku kejahatan harus bertanggung jawab;
 - pembaruan dan mendesain sistem pemilu dan mengejar kebijakan untuk mengurangi “winner-take-all”/pemenang politik yang memperoleh segalanya;
 - menghilangkan rintangan untuk partisipasi perempuan, kaum muda, minoritas, penyandang cacat dan kelompok marjinal tradisional lainnya dan mengambil langkah tegas untuk memajukan kepemimpinan dan partisipasi perempuan yang luas, termasuk melalui penggunaan kuota yang bijaksana; dan
 - mengontrol keuangan politik dengan mengatur donasi dan pengeluaran, pembiayaan publik atas kampanye politik, pelaporan dan transparansi donasi dan pengeluaran, dan sanksi serta penalti bagi yang tidak patuh.
2. Organisasi rakyat harus memonitor kinerja pemerintah dalam memenuhi tantangan integritas pemilu melalui pemantauan pemilu sistematis dan tidak memihak, sesuai dengan prinsip internasional; melalui tindakan sipil untuk mencegah kekerasan pemilu; melalui pemantauan pertanggungjawaban media, keberagaman dan kemandirian; dan melalui tuntutan bahwa partai politik cepat tanggap pada kebutuhan warga negara.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Aksi Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Transnasional

3. Masyarakat Pengamat pemilu harus berkomitmen terhadap standar global untuk pemantauan pemilu dalam negeri dengan Jaringan Global untuk Pemantauan Pemilu Dalam Negeri dan mengikuti Deklarasi Prinsip Gobal dan pedoman perilaku. Pendorong harus berinvestasi dalam peningkatan kapasitas dan kredibilitas pengamatan pemilu dalam negeri dan mendukung Jaringan Global dan para anggotanya.
4. Pemerintah harus bergabung dengan negara sependirian dan bermitra dengan organisasi masyarakat sipil yang mereka punyai untuk memegang pada komitmen yang spesifik mengenai integritas pemilu, pembiayaan pemilu, dan perlindungan terhadap media yang bebas melalui Kemitraan Pemerintahan Terbuka—sebuah gagasan internasional yang menganjurkan pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka mengenai transparansi, akuntabilitas dan pengikutsertaan semua.

5. EMB nasional harus menyelenggarakan dan membuat proses sertifikasi global untuk mengevaluasi dan menilai EMB atas profesionalisme mereka, kemandirian dan kompetensi—termasuk mengembangkan prinsip dan pedoman perilaku secara sukarela untuk mengelola pemilu berintegritas.
6. Institusi dan pemangku kepentingan demokratis harus menciptakan dan membiayai organisasi masyarakat sipil transnasional yang baru—disebut Pemilu Integritas Internasional—didedikasikan untuk membawa perhatian global pada negara-negara yang berhasil atau gagal dalam melaksanakan pemilu berintegritas. Organisasi seperti itu bisa digunakan terhadap malpraktik pemilu seperti Transparansi Internasional terhadap korupsi. Akan mengisi ceruk utama dalam membantu mendukung pertanggungjawaban isu pemilu dengan memberikan informasi, analisis dan jalan lainnya untuk meningkatkan tekanan normatif pada pemerintahan yang gagal menyelenggarakan pemilu berintegritas.

Rekomendasi pada Level Internasional

7. Pendonor harus memprioritaskan pendanaan aktivitas untuk mendukung dan melindungi pemilu berintegritas yang telah kami soroti dalam laporan ini, dengan prioritas yang diberikan untuk membantu negara-negara menangani tantangan menyelenggarakan pemilu berintegritas, dan berinvestasi pada peningkatan kapasitas dan efektivitas pengamatan pemilihan dalam negeri.
8. Perhatian internasional dan regional tingkat tinggi harus diarahkan dan sesuai dengan kebijakan yang diambil, untuk menyampaikan ancaman yang membesar terhadap demokrasi yang ditimbulkan oleh pembiayaan kampanye politik, partai dan kandidat oleh kejahatan terorganisir transnasional.
9. Pemerintahan demokratis, organisasi regional dan organisasi internasional harus mempertahankan pemilu yang berintegritas sebelum pemilu diselenggarakan. Untuk melakukannya, mereka harus lebih proaktif dan terlibat sepanjang siklus pemilu bagi negara-negara dengan pemilu yang bermasalah. Jika mediasi diperlukan, maka harus dilakukan jauh sebelum pemungutan suara berlangsung, dan ditujukan untuk memastikan bahwa dalam masyarakat yang terbelah, pemilihan tidak memberikan jalan bagi “winner-take-all”/pemenang yang mendapatkan seluruh keuntungan dari hasil pemilu. Tindak lanjut seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan teknis pemilu tetapi harus berupaya membuka dialog dan partisipasi masyarakat yang diperlukan untuk proses politik demokratis, yang diperlukan dan berfungsi untuk menghasilkan oleh pemilu berintegritas.
10. Organisasi regional harus menciptakan dan secara jelas mengomunikasikan ‘garis merah’ mereka—larangan malpraktik pemilu yang luar biasa buruk bahwa, jika hal itu dilanggar, akan memicu pengutukan dan sanksi multilateral. Organisasi-organisasi ini harus mengambil tindakan jika batasannya dilangkahi.

11. Pendampingan pendonor jangka panjang harus secara eksplisit dikaitkan dengan rekomendasi oleh pengamat pemilu, dimulai sejak awal siklus pemilu dibandingkan saat singkat sebelum pemilu yang baru. Harus menjadi praktik yang jamak bahwa di dalam negeri terjadi dialog pasca pemilihan antara kelompok pengamat internasional, kelompok pengamat dalam negeri, pejabat pemilu berwenang dan aktor politik untuk mengidentifikasi area bagi upaya reformasi, mempertimbangkan potensi pendampingan internasional untuk reformasi tersebut dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk pemilihan berikutnya. Pemantauan pemilu berikutnya dan rekomendasi yang direvisi kemudian dapat dijadikan dasar perubahan dalam strategi pendampingan untuk memastikan bahwa prinsip fundamental integritas pemilu dihormati.
12. Pendonor sebaiknya mengintegrasikan demokrasi dan integritas pemilu dengan pendampingan pembangunan dan keamanan. Pembangunan harus berkontribusi pada peningkatan pluralisme politik, begitu pula model pemerintahan demokratis dan budaya politik yang menyepelekan bahaya pemilihan di lingkungan yang tidak aman. Pendonor dan negara-negara mitra harus memberikan prioritas pada penguatan berbagai aktor politik yang terlibat dalam proses demokrasi negara, termasuk parlemen, partai politik dalam oposisi dan dalam pemerintahan, media independen dan EMB yang independen. Kerja sama keamanan internasional perlu memberikan pertimbangan yang lebih besar pada kebijakan dan program yang memelihara pluralisme politik dan kompetisi, dalam rangka mempertahankan stabilitas dan demokrasi dalam jangka panjang.
13. Mengingat pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat sipil mempertimbangkan kerangka kerja pembangunan pasca 2015, maka prioritas yang lebih besar harus diberikan pada kemerdekaan politik sebagai bangunan utama dalam pembangunan dan kebutuhan untuk memberikan jangkauan yang lebih luas dan kapasitas bagi masyarakat di mana pun untuk berpartisipasi dalam keputusan politik yang mempengaruhi mereka. Kerangka pasca 2015 harus menyertakan program dan tujuan spesifik untuk menghasilkan pemilu berintegritas, dengan penekanan pada inklusi, transparansi dan pertanggungjawaban.

Catatan Akhir

- 1 Monty G. Marshall and Benjamin R. Cole, *Global Report 2011: Conflict, Governance, and State Fragility* (Vienna, VA: Center for Systemic Peace, 2011). Laporan ini merupakan publikasi tahunan dari para cendekia yang erat kaitannya dengan proyek Polity, yang menilai rezim dengan skala 20 poin, dari otoritarianisme hingga demokrasi.
- 2 Susan Hyde, *The Pseudo-Democrat's Dilemma: Why Elections Became an International Norm* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011).
- 3 Semua definisi integritas diambil dari *Webster's New World Dictionary*.
- 4 Carolien van Ham, 'Clean Elections, Good Governments? Electoral Fraud and Accountability in Third Wave Regimes', Makalah dipresentasikan pada Lokakarya mengenai Tantangan Integritas Pemilu, Kongres Dunia Asosiasi Ilmu Politik Internasional. Madrid, 7 Juli 2012.
- 5 Claudio Ferraz and Frederico Finan, 'Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments', *American Economic Review*, 101 (June 2011), pp. 1274–1311.
- 6 Thomas Fujiwara, 'Voting Technology, Political Responsiveness, and Infant Health', Makalah yang tidak dipublikasikan (November 2010).
- 7 Benjamin A. Olken, 'Direct Democracy and Local Public Goods: Evidence from a Field Experiment in Indonesia', *American Political Science Review*, 104 (2010), pp. 243–67.
- 8 Aila M. Matanock, *International Insurance: Why Militant Groups and Governments Compete with Ballots Instead of Bullets*, Disertasi Doktoral, Universitas Stanford (2012).
- 9 Robert Dahl, *Polyarchy* (New Haven: Yale University Press, 1971).
- 10 Jack Knight and James Johnson, *The Priority of Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2011).
- 11 Jean-Marie Baland, Karl Ove Moene dan James A. Robinson, 'Governance and Development', pada Dani Rodrik dan Mark Rosenzweig (ed.), *Handbook of Development Economics*, Vol. 5, (2010), hal. 4597–656. Lihat juga Daron Acemoglu dan James Robinson, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty* (New York, NY: Crown Publishers, 2012).
- 12 Amy Alexander, Ronald F. Inglehart and Christian Weltzel, 'Measuring Effective Democracy: A Defense', *International Political Science Review*, 33/1 (2012), hal. 41–62.
- 13 Lihat Patrick Merloe, 'Human Rights: the Basis for Inclusiveness, Transparency, Accountability and Public Confidence in Elections', pada John Hardin Young (ed.), *International Election Principles: Democracy and the Rule of Law* (Chicago, Ill: American Bar Association, 2009), hal. 3–39.
- 14 Margaret Levi dan Brad Epperly, 'Principled Principals in the Founding Moments of the Rule of Law', pada James Heckman, Robert L. Nelson dan Lee Cabatingan (ed.), *Global Perspectives on the Rule of Law* (London: Routledge, 2010), hal. 192–209.
- 15 Independent Review Commission, *Report of the Independent Review Commission on the General Elections held in Kenya on 27 December, 2007* (Nairobi: Independent Review Commission, 17 September 2008).
- 16 Ibid.
- 17 Lucas Issacharoff, 'Keeping the Peace in a Tense Election: Ghana, 2008', *Innovations for Successful Societies*, Universitas Princeton (Januari 2010).
- 18 Susan Hyde dan Nicholay Marinov, 'Which Elections Can Be Lost?' Manuskrip, Universitas Yale (2011). Kumpulan Data NELDA tersedia di <http://hyde.research.yale.edu/nelda/>. Juga lihat Leonardo Arriola dan Chelsea Johnson, 'Election Violence in Democratizing States', Makalah disajikan pada konferensi tahunan Asosiasi Ilmu Politik Amerika. Seattle, WA, September 2011 Kumpulan data NELDA, begitu pula Arriola dan Johnson, menggunakan penilaian berbeda terhadap kekerasan pada periode waktu yang berbeda (1960–2006 dan 1985–2005 secara berurutan) namun keduanya menemukan bahwa sekitar 20 persen pemilihan mengalami kekerasan. Sebagai tambahan, studi PBB tahun 2010 menemukan bahwa 20 persen pemilihan yang diselenggarakan di seluruh dunia selama 2008 terlibat dalam kekerasan pemilu yang berujung pada kematian. Lihat Philip Alston, *Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions: Addendum on Election-Related Violence and Killings*, diserahkan ke Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Sesi ke-Empat Belas, Agenda Item 3 (21 Mei 2010).
- 19 Lihat Shola Omotola, 'Explaining Electoral Violence in Africa's "New" Democracies', *African Journal of Conflict Resolution*, 10/3 (2008), hal. 51–73; perkiraan kematian oleh Pengawas Hak Asasi Manusia, 'Post-Election Violence Killed 800', 17 Mei 2011, tersedia di <http://www.hrw.org/news/2011/05/16/nigeria-post-election-violence-killed-800>.

- 20 Lihat Sylvester Odion Akhaine, 'Nigeria's 2011 Elections: The "Crippled Giant" Learns to Walk?' *African Affairs*, 110/441 (2011), hal. 649–55.
- 21 Lihat Akhaine dan Pengawas Hak-Hak Asasi Manusia.
- 22 Lihat Pengawas Hak-Hak Asasi Manusia dan Kelompok Krisis Internasional, 'Lessons from Nigeria's 2011 Elections', *Africa Briefing No. 81*, 15 September 2011, tersedia di <http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/nigeria/B81%20Lessons%20from%20Nigerias%202011%20Elections.aspx>.
- 23 Elisabeth J. Wood, 'Challenges to Political Democracy in El Salvador', Makalah dipersiapkan untuk Konferensi Asosiasi Studi Amerika Latin. Washington, D.C., 5–8 September 2001, hal. 5.
- 24 Kristine Hoglund, Anna K. Jarstad dan Mimmi Soderberg Kovacs, 'The Predicament of Elections in War-Torn Societies', *Democratization*, 16/3 (2009), hal. 530–57.
- 25 Benjamin Reilly, 'Post-War Elections: Uncertain Turning Points of Transition', pada Anna K. Jarstad dan Timothy D. Sisk (ed.), *From War to Democracy: Dilemmas of Peacebuilding* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
- 26 Barbara F. Walter, 'Designing Transitions from Civil War: Demobilization, Democratization, and Commitments to Peace', *International Security*, 24/1 (1999), hal. 127–55.
- 27 'Elections in Post-Conflict Situations,' Latar Belakang Makalah untuk Komisi Global, tersedia di situs web Komisi.
- 28 Rikhil Bhavnani 'Do Electoral Quotas Work after they are Withdrawn? Evidence From a Natural Experiment in India', *American Political Science Review*, 103/1 (2009), hal. 23–35.
- 29 Raghavendra Chattopadhyay and Esther Dufto 'Women as Policy Makers: Evidence From a Randomized Policy Experiment in India', *Econometrica*, 72/5 (2004), hal. 1409–43.
- 30 The Sentencing Project, *Felony Disenfranchisement: An Annotated Bibliography* (Washington, D.C., Maret 2012).
- 31 Dana Pertahanan Hukum dan Pendidikan NAACP, *Defending Democracy: Confronting Modern Barriers to Voting Rights in America* (New York: NAACP, Desember 2011).
- 32 Wendy Weiser dan Lawrence Norden, *Voting Law Changes in 2012* (Pusat Brennan untuk Keadilan, New York University School of Law, 2011).
- 33 A.S. Belenky dan R.C. Larson, 'Voting Queues', *Analytics* (Musim Semi 2008).
- 34 Spencer Overton, 'Voter Identification', *Michigan Law Review*, 105 (2006–2007), hal. 631–82.
- 35 Uni Inter-Parlemen, *Is Parliament Open to Women? An Appraisal* (Jenewa: Uni Inter-Parlemen, September 2009), tersedia di: <http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn09-e.pdf>.
- 36 Data dikompilasi dari International IDEA dan PBB Wanita, *In Pursuit of Justice: Progress of the World's Women* (2011).
- 37 Berdasarkan data dari International IDEA dan Perempuan PBB.
- 38 Cass Sunstein, quoted in Knight and Johnson, *The Priority of Democracy*, hal. 244.
- 39 Rikhil Bhavnani, 'Do Electoral Quotas Work after They Are Withdrawn? Evidence from a Natural Experiment in India', *American Political Science Review*, 103/1 (2009), hal. 23–35; Maria De Paola, Vincenzo Scoppa dan Rosetta Lombardo, 'Can Gender Quotas Break Down Negative Stereotypes? Evidence From Changes in Electoral Rules', *Journal of Public Economics*, 94/5–6 (2010), hal. 344–53. Lihat Lakshmi Iyer et al., 'The Power of Political Voice: Women's Political Representation and Crime in India', Makalah Kerja (2011), tersedia di: <http://www.hbs.edu/research/pdf/11-092.pdf>.
- 40 Drude Dahlerup, 'Electoral Gender Quotas: Between Equality of Opportunity and Equality of Results', *Representation*, 43/2 (2007).
- 41 Henry Brady, Sydney Verba dan Kay Schlozman, 'Beyond SES: A Resource Model of Political Participation', *American Political Science Review*, 89/2 (1995), hal. 271–94.
- 42 Kevin Casas Zamora, *Paying for Democracy: Political Finance and State Funding for Parties* (ECPR Press, 2005).
- 43 Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Dunia, *World Report on Disability* (Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia, 2011), tersedia di: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html.
- 44 "The Bill of Electoral Rights for Citizens with Disabilities" (Stockholm: International IDEA 16 September 2002), tersedia di: http://www.idea.int/elections/upload/Final_Bill_of_Rights.pdf.
- 45 Kebenaran Sierra Leone dan Komisi Rekonsiliasi, *Witness to Truth: Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Committee, Appendix 5: Amputations in the Sierra Leone Conflict* (2004).

- 46 IFES, *An Action Plan For Electoral Participation of People with Disabilities: Sierra Leone Case Study*, Volume II, Makalah IV (Juli 2001), tersedia di: http://www.electionaccess.org/publications/briefings/01_06_SierraLeone.htm.
- 47 Kevin Casas Zamora, 'Dirty Money', *Americas Quarterly* (Musim Semi 2010).
- 48 James Cockayne, *'Transnational Threats: The Criminalization of West Africa and the Sahel'*, Policy Brief (Washington, D.C.: Pusat Kerja Sama Kontra-Terrorisme Global, Desember 2011).
- 49 Pusat Brennan untuk Keadilan, *'National Survey: Super PACs, Corruption, and Democracy'*, tersedia di: http://brennan.scdn.net/5d2ff3bdfc12b2eb27_pym6b9cdv.pdf.
- 50 Ibid.
- 51 Ibid.
- 52 *Harper v. Canada* (Kejaksanaan Agung), [2004] 1 S.C.R. 827, 2004 SCC 33.
- 53 Lawrence Lessig, *Republic Lost: How Money Corrupts Congress—And a Plan to Stop It* (NY and Boston: Dua Belas, 2011).
- 54 Magnus Ohman, *'Global Trends in the Regulation of Political Finance'*, Makalah dipersiapkan untuk Konferensi Gabungan IPSA-ECPR. Universitas Sao Paulo, Brazil, 2011.
- 55 Seluruh dunia, larangan paling umum atas sumbangan politik berhubungan dengan sumber daya pemerintahan (di luar ketentuan pendanaan publik yang sudah diatur). Sumber: International IDEA, Basis Data Keuangan Politik (2012), tersedia di: <http://www.idea.int/political-finance/index.cfm>.
- 56 Ibid.
- 57 Sarah Birch, *Electoral Malpractice* (Oxford: Oxford University Press, 2011).
- 58 Levi and Epperly, 'Principled Principals'.
- 59 Birch, *Electoral Malpractice*.
- 60 Melissa Estok, Neil Nevitte dan Glenn Cowan, *The Quick Count and Election Observation: An NDI Handbook for Civic Organizations and Political Parties* (Washington, D.C.: National Democratic Institute, 2002).
- 61 Eric Bjornlund, *Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy* (Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore dan London: The John Hopkins University Press, 2004).
- 62 Proses analog sudah ada untuk sertifikasi badan nasional hak asasi manusia berdasarkan Prinsip Paris bagi Lembaga Hak Asasi Manusia. Prinsip Paris bagi Lembaga Hak Asasi Manusia membuat sekumpulan standar untuk badan nasional hak asasi manusia, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut yaitu persyaratan pokok proses akreditasi yang mengatur akses ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan lainnya. Prinsip Paris didefinisikan pertama kali pada Lokakarya Internasional tentang Lembaga Nasional untuk Dukungan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di Paris pada 7-9 Oktober 1992 Prinsip ini diadopsi oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi 1992/54 tahun 1992 dan oleh Majelis Umum PBB pada Resolusi 48/134 tahun 1993. Sesuai dengan Prinsip Paris adalah persyaratan pokok proses akreditasi yang mengatur akses Badan Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI) ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan lainnya. Ini merupakan sistem ulasan sejawat yang dijalankan oleh sub-komite dari Komite Koordinasi Internasional NHRI.
- 63 Alan Wall, Sara Staino, Joram Rukambe, Andrew Ellis, Ayman Ayoub dan Carl Dundas, *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2006).
- 64 Mark Leonard, *'The Dark Flip Side of European Technocracy'*, 31 Mei 2012, tersedia di <http://blogs.reuters.com/great-debate/2012/05/31/the-dark-flip-side-of-european-technocracy/>.
- 65 Bagian ini diambil dari 'International Responses to Flawed Elections', Background Paper for the Global Commission, tersedia di situs web Komisi.
- 66 Evaluasi paling canggih dari pengamatan pemilihan yaitu berdasarkan sekumpulan data komprehensif dari seluruh pemilihan antara 1960 dan 2005. Walau data berakhir tahun 2005, ketika banyak organisasi pengamat internasional berusaha mengodifikasikan praktik terbaik untuk memprofesionalkan pengamatan, data memiliki temuan penting baik untuk kinerja observasi dan trend yang mendahului upaya kodifikasi. Lihat Hyde, *The Pseudo-Democrat's Dilemma* dan Judith Kelley, *Monitoring Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2012).
- 67 *'Elections in Post-Conflict Situations'*, Latar Belakang Makalah untuk Komisi Global, tersedia di situs web Komisi.
- 68 Kelley, *Monitoring Democracy*; Birch, *Electoral Malpractice*.
- 69 Hassan Wirajuda, *'Seeds of Democracy in Egypt: Sharing is Caring'*, Strategic Review, 1/1 (August 2011), hal. 147–58.

Singkatan

ASEAN	<i>Association of South East Asian Nations</i> Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
AU	<i>African Union</i> Uni Afrika
BDF	<i>Bali Democracy Forum</i> Forum Demokrasi Bali
DRC	<i>Democratic Republic of Congo</i> Republik Demokrasi Kongo
ECK	<i>Electoral Commission of Kenya</i> Komisi Pemilihan Umum Kenya
EMB	<i>electoral management body</i> badan penyelenggara pemilu
EU	<i>European Union</i> Uni Eropa
FMLN	<i>Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (El Salvador)</i> Barisan Kemerdekaan Nasional Farabundo Marti (El Salvador)
IDP	<i>internally displaced person</i> rakyat terlantar internal
INEC	<i>Independent National Electoral Commission (Nigeria)</i> Komisi Pemilihan Umum Nasional (Nigeria)
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> Organisasi Internasional untuk Standardisasi
MDG	<i>Millennium Development Goal</i> Tujuan Pembangunan Milenium
NAMFREL	<i>National Citizens Movement for Free Elections (the Philippines)</i> Gerakan Rakyat Nasional untuk Pemilu Bebas (Filipina)
OAS	<i>Organization of American States</i> Organisasi Negara Bagian Amerika
OGP	<i>Open Government Partnership</i> Kemitraan Pemerintah Terbuka
PAC	<i>Political Action Committee (USA)</i> Komite Aksi Politik (AS)
TPS	Tempat Pemungutan Suara
UN/PBB	<i>United Nations</i> Perserikatan Bangsa-Bangsa

Ucapan Terima Kasih

Banyak individu dan lembaga yang berkontribusi pada kerja Komisi Global selama musyawarah mereka. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kontribusi mereka. Dua puluh tujuh (27) negara anggota International IDEA memberikan dukungan politik dan finansial yang penting untuk aktivitas Komisi, dan Komisi sangat berterima kasih karenanya. Dukungan keuangan tambahan diterima dari Pemerintah Australia, Belanda dan Norwegia. Pendanaan dari Bpk. Harushisa Handa, Ketua Dukungan untuk Pengembangan Seluruh Dunia, dan Yayasan Kofi Anna juga berkontribusi pada gagasan ini.

Riset substantif Komisi dipimpin oleh Direktur Komisi, Stephen Stedman, Rekan Senior Freeman Spogli pada Pusat Demokrasi, Pembangunan dan Peraturan Hukum di Universitas Stanford. Tim riset yang berlokasi di Universitas Stanford berkontribusi pada aspek-aspek penting agenda riset Komisi: Andrea Abel, Kathryn Aubrey-Horvath, Kara Downey, Lexie Frosh, William Gallery, Kerry Kraemer, Melissa Lee, Samantha Maskey, Kennedy Opalo, Brenna Powell, dan Lauren Prather.

Sekretariat diselenggarakan oleh International IDEA untuk mendukung semua aspek kerja Komisi Global. Sekretariat dipimpin oleh Zachary Alpern dan termasuk Therese Arnewing, Alberto Guevara Castro, Rosinah Ismail-Clarke, dan Valeria Virzı. Direktur dan Sekretariat bekerja dalam koordinasi yang erat dengan Kantor Kepala: Ruth McCoy, Carlos Oliver Cruz dan Kathryn Kirk.

Anggota Komisi Global mendapat manfaat dari uraian oleh Brigalia Bam, Judith Kelley, dan Richard Youngs. Tim riset mendapat manfaat dari komentar dan pendampingan peneliti dan praktisi di bidang pemilihan, demokrasi dan keamanan: Leonardo Arriola, Sarah Birch, Dawn Brancuti, Michelle Brown, Sarah Bush, Michael Callen, Daniella Donno, Thad Dunning, Andrew Ellis, James Fearon, Elin Falguera, Susan Hyde, Adrienne LeBas, Steven Levitsky, Nikolay Marinov, Patrick Molutsi, Edward Mortimer, Pippa Norris, Susan Rose-Ackerman, Alberto Simpsen, Jack Snyder, Susan Stokes, Haynie Wheeler, dan Daniel Zovatto.

Diskusi yang bersemangat dan produktif antara Direktur dan Kelompok Penasihat menginformasikan laporan ini. Kelompok ini, diketuai Vidar Helgesen dan terdiri dari praktisi yang bertugas sesuai kapasitas masing-masing termasuk Richard Atwood, Brigalia Bam, Manuel Carrillo, David Carroll, Geraldine Fraser-Moleketi, Pablo Gutiérrez, Craig Jenness, Ed Killesteyn, Bernhard Knoll, Janez Lenarčič, Beata Martin-Rozumilowicz, Charlotte McDowell, Patrick Merloe, Georges Nakseu-Nguefang, S.Y. Quraishi, Hugo Sada, Mark Stevens, Michael Svetlik, William Sweeney, dan Malgorzata Wasilewska.

© International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2012

© Kofi Annan Foundation 2012

Pandangan yang dinyatakan dalam publikasi ini tidak berarti mewakili pandangan International IDEA, Yayasan Kofi Annan, atau dewan eksekutif, badan yang memerintah dan/atau anggota masing-masing. Laporan ini independen dari kepentingan nasional atau politik khusus.

Permohonan izin untuk mereproduksi atau menerjemahkan semua atau sebagian publikasi ini harus ditujukan ke:

Kofi Annan Foundation, P.O. Box 157, 1202 Geneva 20, Switzerland

International IDEA, Strömsborg, SE - 103 34 Stockholm, Sweden

Desain oleh Provokateur: www.provokateur.com

Alih bahasa oleh: Yulia Absari

Penyunting: Sri Nuryanti dan Adinda Taihitu Villanueva

Desain grafis oleh: Santoso Cahyono Firdaus Integrated Design Firm

Dengan dukungan dari



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade



NORWEGIAN MINISTRY
OF FOREIGN AFFAIRS



Ministry of Foreign Affairs of the
Netherlands



Gagasan gabungan



Kofi Annan
FOUNDATION

